

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DINAS SOSIAL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA
SUKAMAJU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : ANGGRENI ISRAWATI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 217121043
BIDANG KAJIAN : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2023

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DINAS SOSIAL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA
SUKAMAJU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Oleh

Anggreni Israwati

NPM : 217121043

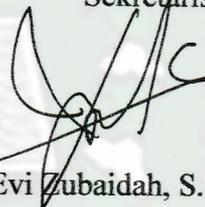
TIM PENGUJI

Ketua



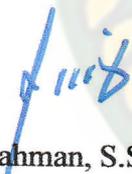
Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Sekretaris



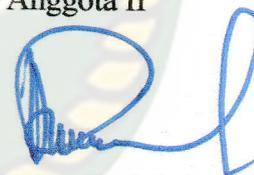
Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I, MPA

Anggota I



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Anggota II



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DINAS SOSIAL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA
SUKAMAJU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Nama : Anggreni Israwati
NPM : 217121043
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

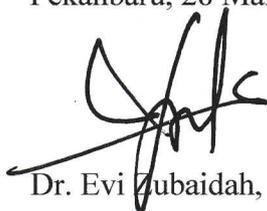
Pekanbaru, 28 Maret 2023



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si.

Pembimbing II

Pekanbaru, 28 Maret 2023



Dr. Evi Zubaidah, S.Sos., I. MPA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Dr. H. Moris Acidi Yogia, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian Komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggreni Israwati
NPM : 217121043
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Proposal Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Pembuatan Pernyataan



Anggreni Israwati



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 057/A-UIR/5-PPS/2023

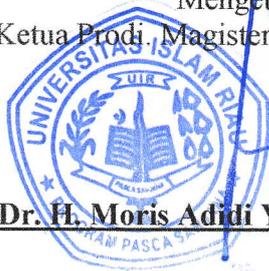
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ANGGRENI ISRAWATI**
NPM : **217121043**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 13 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 13 Maret 2023
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 13-Mar-2023 08:40 WIB
ID: 2035622568
Word Count: 17209
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 24% Publications: 8% Student Papers: N/A

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DINAS SOSIAL
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MASYARAKAT DESA
SUKAMAJU KABUPATEN BENGKALIS By
Anggreni Israwati

9% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/11351/1/177310372.pdf>

2% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/9891/1/187121007.pdf>

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/11165/1/187122077.pdf>

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/6614/1/147110642.pdf>

1% match (Internet from 07-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8321/1/177121020.pdf>

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/7422/1/157310538.pdf>

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/9919/1/177121026.pdf>

1% match (Internet from 24-Dec-2022)

https://smartpb.bpbdd.jatimprov.go.id/public/v_disasterlogs_list.php?goto=31

1% match (Internet from 12-Sep-2022)

<https://pkhlosarang.blogspot.com/>

1% match (Internet from 23-Nov-2022)

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15589/7/Lisa%20Nurhidayati%2C%20160604061%2C%20FEBI%2C%20IE%2C%20082311913287.pdf>

1% match (Internet from 07-Feb-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225831609.pdf>

1% match ()

GITA TIARA, -. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI (BSNT) DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI (STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI", 2021

1% match (Internet from 29-Jan-2019)

<http://dinsos.bengkaliskab.go.id/index.php?com=halutama&link=profil>

1% match ()

CITA FAUZIATUL AKMALA, NIM. 13250100. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG", 2017

1% match (Internet from 09-Mar-2023)

<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/9595/PEER-REVIEW-Efektivitas-Pelaksanaan-Program-Keluarga-Harapan-PKH-Dalam-Upaya-Penanggulangan-Kemiskinan-Di-Desa-Lonuo-Kecamatan-Tilingkabila-Kabupaten-Bonebolango.pdf>

1% match ()

Nurlina, Eva, Zubaidah, Evi. "PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM REVITALISASI JALUR LAMBAT PASAR PAGI ARENGKA", 'UIR Press', 2017

1% match (Internet from 06-Dec-2022)

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/1576/822/>

1% match ()

Kartiawati, K. "Analisis Efektivitas Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai KeC. Banjit Kab. Way Kanan)", 2017

1% match (Internet from 16-Sep-2022)

<http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6921/1/1710300032.pdf>

1% match (Internet from 14-Nov-2022)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika/article/download/11303/5343>

1% match (Internet from 21-Jul-2021)



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 243/KPTS/PPs-UIR/2023

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 - SuratPermohonan Perubahan Judul **Sdr/i Anggreni Israwati** tanggal 13 Maret 2023 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 08 November 2022
 - Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 861/KPTS/PPs-UIR/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I, MPA	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANGGRENI ISRAWATI**
 N P M : **217121043**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis Baru : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA SUKAMAJU KABUPATEN BENGKALIS".**

- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 26 Sya'ban 1444 H
 18 Maret 2023 M



Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
 NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

- Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MASYARAKAT DESA SUKAMAJU KABUPATEN
BENGKALIS**

ABSTRAK

ANGGRENI ISRAWATI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu kemiskinan menjadikan Negara Indonesia yang sedang mencari berbagai solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, teknik penunjang studi literatur. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan dan informan. yaitu Kepala Dinas Sosial, KASI Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Pendamping PKH, 5 Peserta yang menerima PKH, dan 3 Peserta yang tidak menerima PKH. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH di Desa Sukamaju cukup efektif, dikarenakan masih terdapat kesalahan pendataan peserta PKH yang tidak memenuhi kriteria, kemudian penyalahgunaan dana dari peserta PKH diluar dari bidang yang ditentukan serta belum terpenuhi Fasilitas Lembaga Keuangan seperti BRI Link untuk pencairan dana. Agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai, perlu adanya kerja sama yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dengan para peserta penerima dana PKH serta pengawasan dari semua pihak. Perlu kesadaran bagi masyarakat peserta PKH dalam menggunakan dana yang diterima.

Kata Kunci : Efektivitas; Program Keluarga Harapan, Penanggulangan Kemiskinan.

**THE EFFECTIVENESS OF IMPELEMENTING THE SOCIAL
SERVICE'S FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN POVERTY
REDUCTION EFFORTS IN THE COMMUNITY OF SUKAMAJU
VILLAGE, BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

ANGGRENI ISRAWATI

The background of this research is the issue of poverty, which makes Indonesia the state that is looking for various solutions to overcome the problem of poverty. This study aims to analyze and explain the Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) of the Social Service in Efforts to Reduce Poverty in the Communities of Sukamaju Village, Bengkalis Regency. This study uses a qualitative descriptive research method using observation, supporting techniques for literature studies. Primary data was obtained directly through interviews with key informants and informants. namely the Head of the Social Service, KASI Family Social Security, Social Assistance Officer, PKH Facilitator, 5 Participants who received PKH, and 3 Participants who did not receive PKH. Secondary data obtained from research documentation. The results of this study indicate that the implementation of PKH in Sukamaju Village has not been implemented properly, because there are still errors in the data collection of PKH participants who do not meet the criteria, then misuse of funds from PKH participants outside of the specified fields and has not fulfilled Financial Institution Facilities such as BRI Link for disbursement of funds. In order for the policies set by the government to be achieved, there needs to be good cooperation from the central and regional governments with participants who receive PKH funds as well as supervision from all parties. Awareness is needed for PKH participating communities in using the funds received.

Keywords: Effectiveness; Hope Family Program, Poverty Reduction.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah swt penulis ucapkan, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis”.

Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahannya terdahulu. Dengan mengucap “Allahumma Sholli’ ala Muhammad Wa’alaa Alihi Syayidina Muhammad’ yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbuka lah berbagai hikmah Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Ilmu Administrasi di Universitas Islam Riau. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan Terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Lembaga Pendidikan yang Beliau Pimpin.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Selalu Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si dan Ibu Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I, MPA yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Penyelesaian Tesis ini.
7. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis beserta jajarannya yang telah memberikan informasi kepada peneliti membantu penulis dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan Tesis ini.
8. Teristimewa Buat Orang Tua tercinta terutama Ayahanda H. Mispan (Alm) dan Ibunda katijem yang telah mencurahkan kasih sayang yang berlimpah serta berkat usaha dan doa merekalah penulis dapat melewati tahap demi tahap perkuliahan serta penulisan Tesis ini.
9. Kepada Abang Ku Ade Saputra, S.Pd.I dan Kakak Ku Devni Gusliza Sari S.Pd. Gr yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini.
10. Persepupuan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menjadi support system terbaik kepada penulis selama penulis menjalani studi di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
11. Teman-teman seperjuangan Bidang Kajian Utama Administrasi Publik Angkatan 2021 Terkhusus Kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberi pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua dan penulis sadar bahwa Tesis ini masih banyak Kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Tesis ini serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan usulan penelitian berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillaitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Penulis,

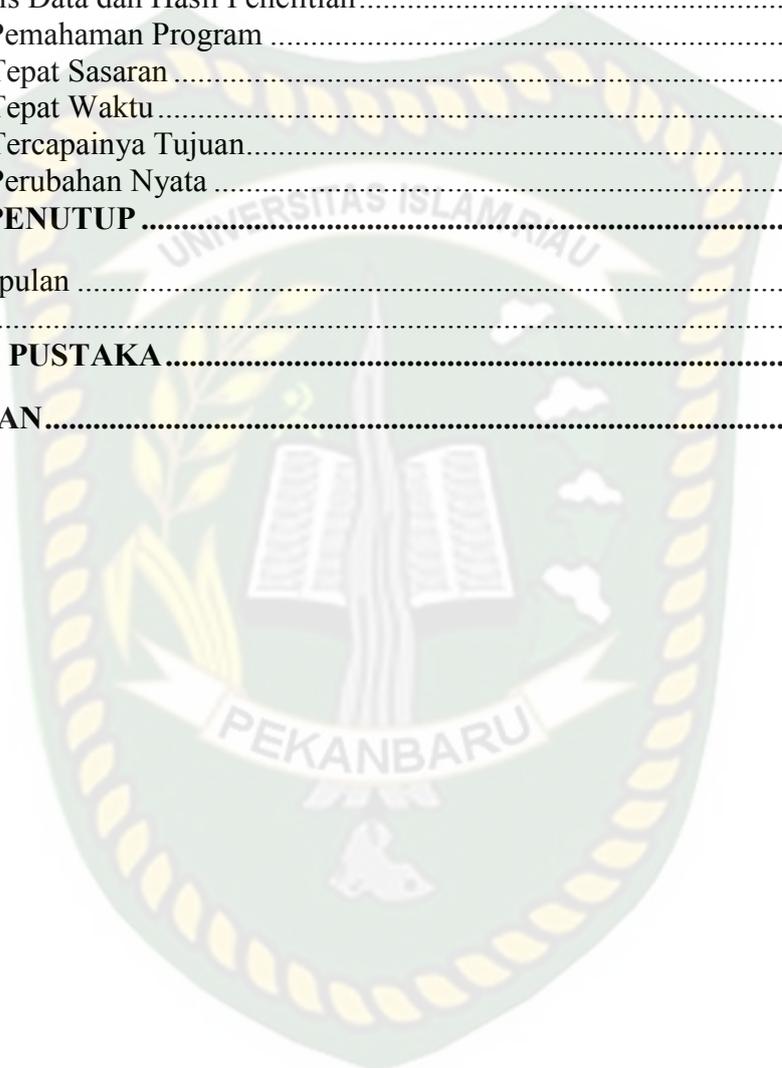
Anggreni Israwati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumus Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian	28
1.4 Manfaat Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN	29
2.1. Tinjauan Pustaka	29
2.1.1. Konsep Administrasi Publik	29
2.1.2. Konsep Organisasi Publik	33
2.1.3. Konsep Manajemen Publik	39
2.1.4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	45
2.5.1. Pemberdayaan Masyarakat	45
2.5.2. Tujuan Pemberdayaan	47
2.5.3. Indikator Pemberdayaan	48
2.1.6. Program Keluarga Harapan (PKH)	50
2.6.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	50
2.6.2. Tujuan Program Keluarga Harapan	51
2.6.3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH	52

2.1.7. Konsep Kesejahteraan.....	55
2.1.8. Konsep Kemiskinan	56
2.8.1. Kemiskinan.....	56
2.8.2. Bentuk dan jenis Kemiskinan	58
2.8.3. Faktor Penyebab Kemiskinan.....	60
2.8.4. Penanggulangan Kemiskinan.....	63
2.8.5. Variabel Kemiskinan.....	64
2.1.9. Efektivitas Kebijakan.....	66
2.9.1. Pengertian Efektivitas Kebijakan.....	66
2.9.2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).....	68
2.9.3. Pengukuran Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH).....	71
2.1.10. Implementasi	74
2.10. Penelitian Terdahulu	76
2.11. Kerangka Berpikir.....	87
2.12. Konsep Operasional	89
2.13. Operasional Variabel.....	93
BAB III METODE PENELITIAN.....	95
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	95
3.2 Lokasi Penelitian.....	96
3.3 Informan dan Key Informan.....	96
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	97
3.5 Jenis dan Sumber Data	98
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	99
3.7 Teknik Analisis Data.....	102
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	104
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	105
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	106
4.2 Profil Singkat Desa Sukamaju	108
4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	109

4.4 Fungsi Dan Tugas Organisasi	112
4.5 Sumber Daya Organisasi.....	113
4.6 Tugas Dan Fungsi Sumber daya Manusia PKH.....	119
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	123
5.1 Identitas Responden	124
5.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	128
5.2.1 Pemahaman Program	128
5.2.2 Tepat Sasaran	140
5.2.3 Tepat Waktu	152
5.2.4 Tercapainya Tujuan.....	164
5.2.5 Perubahan Nyata	176
BAB VI PENUTUP	189
6.1 Kesimpulan	189
6.2 Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	191
LAMPIRAN.....	212

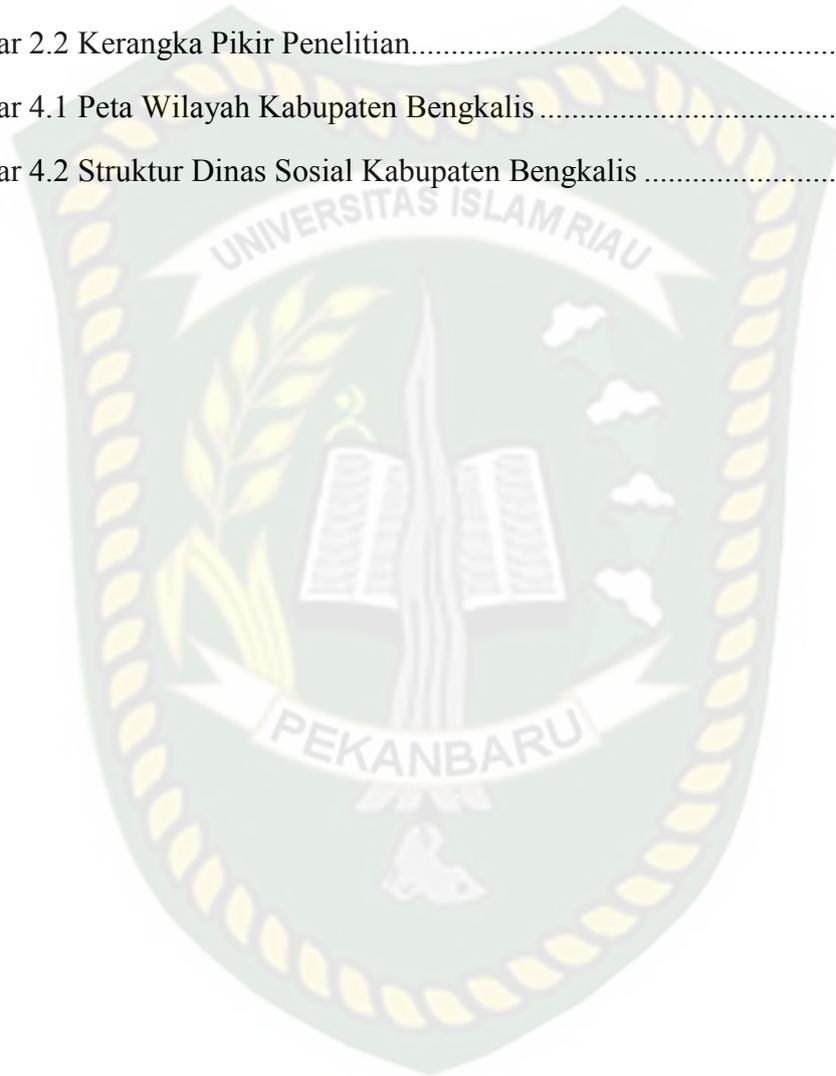


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Penerima Dana Bantuan Sosial Non Tunai (PKH).....	6
Tabel 1.2 Skenario Jumlah Bantuan PKH Tahun 2021 (Pertahap).....	11
Tabel 1.3 Jumlah RTM di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan.....	13
Tabel 1.4 Jumlah KPM PKH di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan.....	14
Tabel 1.5 Jumlah KPM PKH di Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Desa	15
Tabel 1.6 Jumlah Perbandingan antara yang Menerima PKH dan yang tidak Menerima PKH di Desa Sukamaju Per Tahun.....	24
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	77
Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel	94
Tabel 3.1 Informan dan Key Informan	97
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	104
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kab Bengkalis..	107
Tabel 4.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.....	113
Tabel 5.1 Identitas Key informan dan Informan Penelitian Tentang Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.....	124
Tabel 5.2 Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kriteria Usia.....	125
Tabel 5.3 Identitas Key Informan dan Informan dalam Penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin	126
Tabel 5.4 Identitas Key Informan dan Informan dalam Penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Tingkat Pendidikan	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Kartu Peserta PKH	17
Gambar 2.1 Model Organisasi Sebagai Sistem Terbuka dari	34
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	88
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis	107
Gambar 4.2 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	111



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis198
2. Daftar Wawancara untuk Peserta Penerima PKH di Desa Sukamaju mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis202
3. Daftar Wawancara untuk Peserta yang tidak Menerima PKH di Desa Sukamaju mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.....207
4. Dokumentasi Foto Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis212
5. Surat Rekomendasi dari Direktur Program Pascasarjana Usulan Dosen Pembimbing216
6. Surat Rekomendasi Riset dari Program Pascasarjana217
7. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis218

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat luas, selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun pada kenyataannya Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengetasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya karena permasalahan ekonomi, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk dilihat, ditafsirkan, dan memaknai kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang pasti dialami oleh negara berkembang, salah satunya adalah Negara Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memberi kesejahteraan

masyarakatnya, namun nampaknya permasalahan tersebut tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang belum sejahtera kehidupannya.

Kemiskinan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Secara teoritis kemiskinan dikatakan sebagai sebuah fenomena dimana taraf hidup masyarakat didalam sebuah negara masih sangat memprihatinkan (rendah), dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang sekali ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, misalnya mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (Pensiun, Kesehatan, Kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan

melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam upaya pengetasan kemiskinan selama ini, program-program yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh yang berarti, sehingga tujuan pembangunan nasional saat ini terkait masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum terselesaikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanggulangan Kemiskinan. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam permasalahan yang terus bergulir di Indonesia saat ini, pemerintah telah menerapkan penyaluran dana bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program tunai bersyarat yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2007. Program ini bukan merupakan lanjutan dari program bantuan langsung (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah program yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial, dibantu oleh Dinas Sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pendamping PKH di setiap Desa/Kecamatan.

Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan

gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan keluarga harapan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu wujud dalam penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan atas tugas pembantu dengan melakukan penugasan dari pemerintah kepada Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Melalui Program Keluarga Harapan ini akan memberikan dua manfaat yang cukup akurat agar upaya penanggulangan kemiskinan bisa tercapai, yakni manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan efek pendapatan kepada Keluarga Penerima Bantuan melalui pengurangan beban pengeluaran setelah menerima dana bantuan Non Tunai dari Program Keluarga Harapan tersebut dan penghasilan yang didapatkan bisa digunakan untuk keperluan lain seperti membuka usaha. Lalu untuk manfaat dari jangka panjangnya adalah program ini dapat mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi ke generasi yang selama ini sulit diatasi dari tahun ketahun melalui peningkatan kualitas Kesehatan, Pendidikan dan kesenjangan sosial.

Sasaran atau Keluarga Penerima dana bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Namun disamping itu, sasaran atau Keluarga Penerima Bantuan Non Tunai PKH yang bertempat tinggal diwilayah tertentu disebut dengan PKH Akses yang merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan sosial yang berada diwilayah yang sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan, infrastruktur, maupun daya

manusia dengan pengkodisian secara khusus.

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang bersumber dari APBN, dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh Dinas Sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta pendamping PKH di setiap desa/kecamatan. Kelompok sasaran atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah KSM atau RTSM yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Penerima Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Komponen	Kriteria
1.	Bidang Kesehatan	Ibu Hamil/menyusui Anak berusia 0 sampai 6 tahun
2.	Bidang Pendidikan	Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat Anak sekolah menengah pertama/madrasah aliyah atau sederajat Anak berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3.	Bidang Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun. Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

Sumber : Pedoman Kebijakan tentang PKH Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan komponen diatas Bidang Kesehatan Kriterianya Ibu hamil/Menyusui, yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah yang termasuk dalam kategori kurang mampu, tidak mampu ini dalam segi tidak mampu untuk menghidupi anaknya. Dia berhak mendapatkan Bantuan

PKH ini jika sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), jika belum terdaftar tidak berhak mendapatkan Bantuan ini. Untuk komponen Bidang Pendidikan ini adalah Bantuan ini Untuk anak yang ingin sekolah tetapi orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkanya, jika sudah terdata Dalam DTKS maka akan mendapatkan Bansos untuk menyekolahkan anaknya sampai selesai di Tingkat SMA atau Aliyah, jika tidak terdata dalam DTKS maka tidak bisa mendapatkan Bansos ini. Dan untuk Komponen Kesejahteraan Sosial yang berhak mendapatkan Bantuan ini adalah Seorang Bapak/Ibu yang sudah lanjut usia atau Disabilitas yang tidak bisa bekerja lagi berhak untuk mendapatkan Bantuan ini, jika terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maka berhak untuk mendapatkan Bantuan PKH ini jika tidak terdaftar tidak berhak dalam mendapatkan bantuan ini, hanya yang sudah terdaftar.

Setelah ditetapkan sasaran Keluarga Penerima Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan, para penerima dan bantuan memiliki hak dan kewajibannya sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 tahun 2018 pasal (6) dan (7). Adapun hak dari Keluarga Penerima Bantuan adalah :

1. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.

2. Pendamping PKH
3. Pelayanan yang difasilitasi kesehatan, Pendidikan dan Kesenjangan sosial
4. Bantuan Komplementer yang berupa uang, barang dan jasa dibidang Kesehatan, Pendidikan, Subsidi energi, Ekonomi, Perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.

Dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Bantuan adalah :

1. Kewajiban memeriksakan kesehatan, peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan dan wajib memenuhi persyaratan kesehatan ibu hamil, anak balita usia 0-6 tahun yang belum masuk sekolah.
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 12 tahun.
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan, penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Untuk lanjut usia melakukan pemeriksaan kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial difasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti

berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi kerumah.

Apabila sewaktu-waktu Keluarga Penerima Bantuan dana Non Tunai Program Keluarga Harapan tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya peserta penerima dana PKH akan diberikan sanksi berupa penangguhan atas penghentian penerima dana bantuan sosial PKH. Kejadian yang sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan PKH, setiap RTSM pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, walaupun BPS telah memiliki berdasarkan 14 indikator kemiskinan. Namun yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang mampu (kaya) yang menjadi penerima PKH.

Berita yang didapatkan adalah pada kelompok RTSM penerima PKH memiliki perbedaan terkait asset atau kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan asetnya tinggi namun ada juga yang sedikit atau ada juga yang kondisi rumahnya baik dengan lantai keramik dan dinding tembok. Padahal sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan. Bahkan seringkali orang yang mengambil dana PKH menggunakan kendaraan yang bagus dan memakai perhiasan emas. Contohnya : tidak jarang masyarakat penerima PKH dengan kepala keluarga perempuan menggunakan dana yang diberikan untuk membeli baju baru, sepatu baru dan lain-lainnya, tentu saja kalau sudah hal semacam itu terjadi, maka dana bantuan yang disalurkan

pemerintah menjadi tidak efektif lagi karena kurang tepat sasaran proses pembagian.

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan beberapa Lembaga/instansi yang bekerja sama yang meliputi : Kementerian kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Sumber pendanaan dana bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) APBD. Dana dampingan (sharing) ini digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, tidak untuk diberikan kepada peserta penerima dana PKH. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menindak lanjut surat edaran dari Menteri Sosial Nomor 201/MS/C/12/2018 yang berisikan “penyediaan alokasi dan penyertaan PKH dimulai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal sebesar 5%. Kegunaan dana yang dimaksudkan

adalah dana administrasi Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan PKH.

Nilai Bantuan merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks komponen Bantuan Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.2 Skenario Jumlah Bantuan PKH Tahun 2021 (Pertahap)

No	Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
1	2	3
1.	Ibu Hamil	3.000.000,-
2.	Anak Usia Dini	3.000.000,-
3.	SD	900.000,-
4.	SMP	1.500.000,-
5.	SMA	2.000.000,-
6.	Disabilitas	2.400.000,-
7.	Lanjut Usia	2.400.000,-

Sumber : Pedoman Kebijakan Tentang PKH, 2021

Bantuan sosial Non Tunai PKH ini diberikan langsung oleh Tim Penyaluran dana PKH Pemerintah Pusat melalui nomor rekening peserta PKH yang sudah terdaftar dan sudah memiliki kartu peserta PKH. Jumlah bantuan yang diterima ke peserta penerima PKH maksimal 4 orang dalam

satu keluarga. Penerima dana PKH dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam 1 tahun. Pada tahap pertama dilaksanakn pada Bulan Januari, lalu dilanjutkan pada Bulan April, dilanjutkan pada Bulan Juli, dan pada tahap ke empat dilaksanakan pada Bulan Oktober. Yang telah ditetapkan pada peraturan dan pedoman umum Program Keluarga Harapan, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti penting dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bantuan merata pada masyarakat miskin dengan kerjasama dengan pendamping sosial.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.403,28 km. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten Bengkalis ini adalah kota Duri, Mandau, Bengkalis. Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 Desa, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 553.938 jiwa.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sangat tinggi yaitu 49.122 Rumah Tangga Fakir Miskin melihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Jumlah I.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bengkalis
berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Sangat Miskin	Hampir Miskin	Miskin	Sedikit Miskin
1	2	3	4	5	6
1.	Bandar Laksamana	396	216	367	371
2.	Bantan	1.762	1.486	1.414	3.618
3.	Bathin Solapan	1.216	746	991	1.765
4.	Bengkalis	2.853	1.478	2.428	792
5.	Bukit Batu	754	461	644	908
6.	Mandau	1.420	882	1.154	2.977
7.	Pinggir	838	281	1.163	1.428
8.	Rupat	2.442	1.091	1.948	1.346
9.	Rupat Utara	935	405	753	471
10.	Siak Kecil	986	643	769	580
11.	Talang Mandau	610	434	465	435
	Jumlah	14.212	8.123	12.096	14.691

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi, Maka dari itu Program PKH merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan.

Maka dari data yang dijelaskan diatas diketahui bahwa jumlah keluarga pemanfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi, dengan kata lain kebutuhan akan program PKH ini sangat

diperlukan untuk mendukung aspek kesehatan, pendidikan dan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkalis, maka dari itu dalam kebijakan programnya harus dilakukan dengan sebagaimana mestinya baik komunikasi, penyediaan SDM, Fasilitas serta kejelasan mekanisme dan aturan yang mana diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah keluarga pemanfaat program di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1.	Bantan	1.776
2.	Bengkalis	2.894
3.	Bukit Batu	1.177
4.	Mandau	2.684
5.	Pinggir	1.473
6.	Rupat	2.491
7.	Rupat Utara	945
8.	Siak Kecil	991
Jumlah		14431

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Kecamatan Bengkalis yang meliputi 23 Desa dengan jumlah 1.888 KPM, lebih jelasnya pada tabel berikut ini :

Tabel I.5 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Desa

No	Desa	Jumlah Penerima Manfaat
1	2	3
1.	Bantan Air	53
2.	Bantan Sari	46
3.	Bantan Tengah	51
4.	Bantan Timur	112
5.	Bantan Tua	91
6.	Berancah	56
7.	Deluk	109
8.	Jangkang	118
9.	Kembung Baru	91
10.	Kembung Luar	94
11.	Mentayan	95
12.	Muntai	87
13.	Muntai Barat	101
14.	Pambang Baru	50
15.	Pambang Pesisir	69
16.	Pasiran	56
17.	Resam Lapis	76
18.	Selat Baru	74

1	2	3
19.	Sukamaju	128
20.	Teluk Lancar	65
21.	Teluk Pambang	118
22.	Teluk Papal	69
23.	Ulu Pulau	79
Jumlah		1.888

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Desa Sukamaju memiliki jumlah KPM PKH yang paling banyak diantara Desa lainnya yaitu berjumlah 128, kemudian letak Desa Sukamaju merupakan desa luar dari Kecamatan Bengkalis, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan pengambilan Desa Sukamaju sebagai lokasi penelitian.

Penerima Dana Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

1. Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan.
2. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
3. Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di Kartu PKH dan bukan wakilnya.



Gambar 1.2 Contoh Kartu Peserta PKH

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Non Tunai PKH meliputi :

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
2. Sosialisasi dan edukasi
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial.

Dengan semua mekanisme ini, Keluarga Penerima Bantuan dana sosial Non Tunai Program keluarga Harapan di dampingi oleh pendamping/pelaksana oleh pihak PKH. Penerimaan dana bantuan yang didampingi oleh pendamping ini agar dana bantuan didapatkan dengan tepat sasaran yaitu untuk kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial. Peran Pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan keluarga yang memiliki tingkat

Pendidikan yang rendah dan tidak memahami prosedur-prosedurnya sehingga membutuhkan fasilitas pendamping dari pihak PKH.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, Kategori Fakir Miskin dan Kurang mampu dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Fakir Miskin dan Orang Kurang mampu yang teregister

- 1) Tidak mempunyai sumber pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian, satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama.
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/dengan kondisi tidak baik kualitas rendah.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.

- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
 - 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
 - 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- b. Fakir miskin dan Orang Kurang Mampu belum teregister :
1. Gelandangan
 2. Pengemis
 3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil
 4. Perempuan Rawan sosial Ekonomi
 5. Korban Tindak Kekerasan
 6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 7. Masyarakat kurang mampu akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai 1 tahun kejadian bencana
 8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
 9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Perasyarakatan
 10. Penderita Thalassaemia Mayor
 11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari

kelompok yang paling miskin. Secara khusus, Tujuan PKH adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH.
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM)/ Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Pendidikan harus diutamakan dan menjadi prioritas yang harus dikedepankan mengingat kedepan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil merupakan salah satu modal utama suatu bangsa untuk dapat bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat. Kesulitan mendapatkan akses pendidikan bukanlah satu-satunya masalah yang diakibatkan karena kondisi kemiskinan.

Perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya, banyak anak yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menompang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup kedepannya. Sementara itu secara khusus tujuan PKH adalah meningkatkan konsumsi keluarga penerima PKH, meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak

peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial, dan memastikan terpeliharannya taraf kesejahteraan sosial. (Kemensos).

Adapun pelaksana dari PKH sebagai Program nasional adalah Kementerian Sosial yang bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian ditingkat provinsi ada Unit Pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH) Provinsi di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi, sedangkan tingkat Kabupaten/Kota ada UPPKH Kabupaten/Kota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K 2012).

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah Kabupaten/Kota Program PKH dilaksanakan oleh Dinas Sosial di daerah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mendampingi keluarga miskin penerima PKH agar pelaksanaan PKH tepat sasaran dan dapat pemanfaatan baik di tingkat Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa. (Pedoman Umum PKH, 2021).

Keterangan alur Pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program ini dimulai dengan pengumpulan data target peserta program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan peserta dan melakukan validasi.

2. Selanjutnya pemenuhan syarat-syarat peserta manfaat, setelah memenuhi semua syarat maka otomatis sudah menjadi peserta penerima manfaat.
3. Setelah menjadi peserta penerima manfaat maka selanjutnya peserta menerima dana bantuan PKH. Penyaluran bantuan ini diberikan dalam bentuk uang kepada peserta. Penyaluran bantuan ini pada awalnya diberikan secara tunai, namun sejak tahun 2016 beralih menjadi non tunai. Bantuan dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau dengan pembukaan rekening.
4. Selanjutnya peserta mendapatkan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
5. Selanjutnya mengadakan pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga untuk melihat perubahan perilaku peserta. Tujuannya agar peserta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai anggota penerima manfaat PKH.
6. Kemudian untuk pemenuhan kewajiban peserta penerima manfaat, dilakukan verifikasi komitmen. Pelaksana Program Keluarga Harapan harus memastikan seluruh peserta Penerima manfaat

yang terdaftar hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

7. Dan selanjutnya adalah melakukan pemutakhiran data, yang tujuannya adalah untuk melihat kondisi terkini peserta penerima manfaat.

Diantara tujuh alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini yang tidak dilaksanakan pada nomor 6 dan nomor 7, Pendamping PKH Desa jarang sekali turun kelapangan jarang sekali mengawasi, pendamping hanya tau masyarakat yang dikategori orang yang kurang mampu sudah mendapatkan Bantuan PKH ini ternyata malah sebaliknya, masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maka dari itu Pendamping harus lebih teliti lagi dalam menyikapi masalah ini.

Berikut ini adalah perbandingan antara yang menerima Program Keluarga Harapan dan yang tidak menerima PKH di Desa Sukamaju adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Perbandingan antara yang Menerima PKH dan yang tidak Menerima PKH di Desa Sukamaju Per Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk yang Menerima PKH	Jumlah Penduduk yang tidak Menerima PKH
2018	92 Orang	11 Orang
2019	108 Orang	18 Orang
2020	119 Orang	9 Orang
2021	128 Orang	20 Orang

Sumber : Desa Sukamaju, 2021.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2021 masih ada penduduk Desa Sukamaju yang tidak menerima Bantuan PKH ini seharusnya menerima, dikarenakan masih banyak yang belum terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maka dari itu masih banyak yang belum terdata. Tugas Desa mendata orang-orang yang layak atau berhak mendapatkan bantuan ini agar orang yang kurang mampu ini dapat terbantu perekonomiannya, jika Desa tidak bisa mendata serahkan kepada RT, RW untuk mendata orang yang seharusnya mendapatkan Bantuan PKH ini setelah didata langsung laporkan kepada Dinas Sosial agar segera bisa diproses oleh Dinas Sosial.

Adapun beberapa penyebab yang tidak menerima bantuan PKH adalah sebagai berikut :

1. Data NIK/No KK tidak valid capil
2. Data Dapodik tidak terindikasi sistem, kemungkinan kesalahan penginputan NIK, Nama, dll di data dapodik sekolah, jadi harus di cek anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan NIK.
3. Data lansia terindikasi belum melakukan eKTP di capil.
4. Perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM (misal nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya).
5. Terindikasi penerima dobel bansos dalam satu KK (misal istri penerima PKH, anggota penerima bansos lain selain PKH).
6. Terindikasi ada tunggakan pinjaman Bank baik pinjaman online ataupun Bank biasa.
7. Komponen belum masuk DTKS di dinas sosial.
8. Komponen sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas.
9. Komponen disabilitas belum terindikasi di sistem.
10. Komponen ibu hamil belum terindikasi di sistem.
11. Pengurus meninggal dunia, saat pengupdetan data capil no KK berubah.
12. NIK KPM berubah di sistem.
13. Nama pengurus beda dengan di buku tabungan.
14. Terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit.

15. Terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mampu dalam KK.

Dengan adanya penerima dana PKH ini pemerintah benar-benar mengharapkan keluarga penerima dan bantuan dapat menggunakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti menyekolahkan anak-anaknya dan mengutamakan kesehatan. Tetapi pada realitanya, peserta penerima dana PKH di Kabupaten Bengkalis menyalahgunakan fungsi uang yang diberikan oleh pemerintah untuk kebutuhan diluar itu. Misalnya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang, membeli pakaian (shopping), membayar credit motor, dan lainnya. Ini disebabkan karena egoisme diri peserta penerima dana PKH tersebut dan juga disebabkan kurangnya pendamping PKH untuk memberikan penyuluhan kepada peserta terkait dengan Kesehatan dan Pendidikan. Adapula permasalahan lain yang didapatkan dilapangan ialah salah sasaran keluarga penerima dana Bantuan Non Tunai PKH. Keluarga tersebut cukup mampu dalam kehidupannya, memiliki rumah yang layak huni, memiliki kendaraan lebih dari satu dan berpenghasilan yang cukup namun mereka menerima dana PKH. Kesalahan ini mungkin terjadi saat pemerintah melakukan pendataan yang kurang akurat dan menggunakan data yang lama dan belum di upgrade. Karena yang melaksanakan pendataan adalah Tim Koordinasi langsung dari pusat bukan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Presurvei peneliti di lapangan dari Bulan (Agustus-Desember , 2022) maka ditemui beberapa fenomena yaitu :

1. Kurangnya sarana dalam kegiatan pelaksanaan PKH. Contohnya apabila ada kendala dalam pencairan dana PKH ataupun terjadi kerusakan PIN rekening penerima dana tersebut, maka peserta penerima dana PKH harus mengurusnya keluar daerah seperti dikota Bengkalis. Dikarenakan didaerah Desa Sukamaju tidak memiliki cabang kantor BANK yang menangani seluruh pencairan dana PKH yang ada BRI Link atau agen-agen kecil.
2. Penyalahgunaan dana PKH terhadap peserta penerima PKH, yang seharusnya dana PKH tersebut digunakan untuk keperluan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tetapi malah dipergunakan untuk kegunaan diluar itu.

Demikian hasil fenomena yang didapat langsung dari peneliti dari berbagai data dan sumber dengan langsung turun kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis ?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut : Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik dari dimensi konsep Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju.

2. Manfaat Akademis :

Diharapkan bermanfaat untuk literatur sumber bacaan dan pengutipan untuk penelitian lanjutan Peneliti dan Peneliti lainnya.

3. Manfaat Praktis :

Diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan konsep yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka perlu adanya teori-teori yang disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga permasalahan ini mampu disesuaikan dengan yang diharapkan.

2.1.1 Konsep Administrasi Publik

Ilmu Administrasi lahir karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan lahirnya ilmu ini tidak dengan sendirinya tetapi melalui perjuangan yang cukup lama oleh para pencintanya. Selanjutnya agar ilmu ini dapat berkembang sepanjang masa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ilmu ini memerlukan pembinaan dan pengembangan. Sudah pasti bahwa orang-orang yang menjadi pembina dan pengembang ilmu administrasi ini adalah orang-orang yang telah menspesialisasikan dirinya dalam bidang ilmu administrasi, berikut orang-orang yang membutuhkannya atau masyarakat pada umumnya (Mahmudi, 2010;89).

Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “*Administration*”, berasal dari kata latin yaitu : “*Ad + Ministrare*” dan “*Administration*”. *Ad + Ministrare* berarti melayani, membantu dan memenuhi (Gie, 2010:56). Sedangkan *Administration* berarti pemberi bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan (Atmosudirjo, 2010:21). Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah

ditentukan. Dalam hal proses kenaikan pangkat maka administrasi ini memiliki fungsi sebagai sebuah proses administrasi pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kenaikan pangkat pegawai. Siagian (2011:33) menegaskan Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut “menata” atau “penataan”. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah serangkaian kegiatan penataan (Robbins, 2010:155). Hendry fayol (dalam Sufian dan Indra M.A., 2016:34) membedakan antara prinsip dan unsur manajemen. Prinsip-prinsip umum dan unsur-unsur manajemen terdiri dari :

- 1) pembagian kerja;
- 2) otoritas dan tanggung jawab,
- 3) disiplin
- 4) kesatuan komando,
- 5) kesatuan pengarahan,
- 6) mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan perorangan,
- 7) Upah/gaji,
- 8) sentralisasi,
- 9) rantai scalar,
- 10) tata tertib,

- 11) keadilan,
- 12) stabilitas masa jabatan,
- 13) inisiatif,
- 14) semangat korps.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat dijukan adalah kegiatan implementasi kebijakan. Publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Apabila setiap definisi para ahli dipelajarinya, walaupun dengan rumusan yang sangat bervariasi, tapi dapat diperoleh kesimpulan pokok, dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Adminsitrasi adalah kumpulan orang
2. Administrasi adalah proses pembagian kerja.
3. Administrasi adalah sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial.

Menurut Willian Dunn (2013:80) ada beberapa isu atau permasalahan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi publik, antara lain :

- 1) Pelayanan Publik, sebagai proses administrasi untuk publik, pada hakekatnya adalah pemberi pelayanan publik. hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.
- 2) Motivasi Pelayanan Publik. Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.
- 3) Mal-Administrasi. Mal-Administrasi merupakan kesalahan dalam praktek administrasi. Pembahasan teori administrasi juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
- 4) Etika Administrasi Publik. Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.
- 5) Kinerja dan Efektivitas. Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu

bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

- 6) Akuntabilitas Administrasi Publik. Yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggung jawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokok.

2.1.2. Konsep Organisasi Publik

Organisasi sistem terbuka hasil penelitian (Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 1951) menunjukkan bahwa dapat diartikan sebagai suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut hasil penelitian Hicks dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses administrasi yang demikian hasil penelitian Kast dan Rosenzweig (1985:112) menunjukkan bahwa *the organization receives inputs from the society in the form of people, materials, money, and information; it transforms these into outputs of product, service, and rewards to the organizational members participation*. Dengan demikian organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok diluar.

Zulkifli (2005:73) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian

tugas, penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Griffin (dalam Kurniawan, Erni 2002:4) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Organisasi harus berfungsi dua arah serentak. *Pertama*, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. *Kedua*, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain. Model organisasi sebagai sistem terbuka, diilustrasikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Organisasi Sebagai Sistem Terbuka dari

Sumber : Barnard, 1938, Wiener, 1948, Bertalanffy; 1951, Katz dan Kahn, 1987; Hicks dan Dullet, 1987).

Organisasi pemerintahan perdesaan sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen pemerintahan perdesaan menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak out put yang dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan.

Studi Organisasi adalah studi mengenai cara orang memandang obyek-obyek, juga studi mengenai obyek-obyek itu sendiri (Pace dan Faules, 2011:2). Banyak pemikiran dari para ahli yang membahas mengenai organisasi. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlu dilakukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk melakukan pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Banard (2010:56), yaitu organisasi adalah suatu system tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak terwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.

Dalam kata-kata yang lebih sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu pada bekerja untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama dengan alat-alat yang tepat. Sedangkan Sutarto (2012:40) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif didefinisikan dan bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan ini dikemukakan oleh Robbins (2010:144).

Adapun ciri-ciri dari Organisasi adalah :

1. Adanya komponen (atasan dan bawahan)

2. Adanya kerjasama (cooperative yang berstruktur dari sekelompok orang)
3. Adanya tujuan
4. Adanya sasaran
5. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
6. Adalanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.
(Robbins, 2010:146).

Dalam buku “Komunikasi Organisasi” milik R. Wayne Pace dan F. Faules dikatakan bahwa suatu organisasi merupakan sebuah wadah yang menampung orang-orang dan obyek-obyek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Bila organisasi sehat, bagian-bagian yang interdependen bekerja dengan cara yang sistematis untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Pace dan Faules, 2011:17).

Menurut Robbins (2010:50) Organisasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama

Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan.

2. Proses kerjasama sedikitnya antar dua orang

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang.

3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing

Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat dihindarkan.

4. Ada tujuan tertentu

Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

Secara harfiah, organisasi berarti perpindahan dan bagian-bagian yang satu sama lain saling tergantung. Charles I. Bernard mendefinisikan organisasi sebagai sistem dari kegiatan manusia yang bekerjasama. Kemudian Everett M Rogers dan Rekah Agarwala-Rogers dalam (Wijayanti, 2019:97) menyatakan organisasi adalah sistem yang mapan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian kerja.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan dari individu-individu yang didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang dipandang sebagai suatu sistem yang saling melengkapi kebutuhan satu sama lain sehingga tercapainya

tujuan bersama.

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (Publik goods), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Syafri, 2012:89). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif dimana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya.

Ciri-ciri Organisasi Publik menurut Robbins (2010:12) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
3. Organisasi publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.

7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik.
10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

2.1.3. Konsep Manajemen Publik

Secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya : Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2010:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2010:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti (2010:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan

bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

F.W. Taylor (dalam Sufian dan Indra, M.A., 2016:35) menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar manajemen yang mendasari pendekatan ilmiah terhadap manajemen, adalah sebagai berikut : (1) Menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu; (2) Mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok, dan bukannya perpecahan; (3) Mencapai kerjasama manusia, dan bukannya individualisme yang kacau; (4) Bekerja untuk output yang maksimum, dan bukannya output yang terbatas; (5) mengembangkan semua pekerja sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan perusahaan mereka.

Menurut Terry (dalam Syaifiie 2006;49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009;17) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu system administrasi.

Setiap kegiatan organisasi dituntut adanya suatu manajemen yang baik agar kelangsungan hidup organisasi dapat terus terjamin. Manajemen yang baik

merupakan hasil cipta, rasa, karsa, pikiran, dan perbuatan manusia yang dapat menolong manusia dalam mencapai tujuannya. Manajemen yang baik adalah hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun manusia didukung oleh peralatan dan keuangan yang memadai, tetapi yang menentukan baik buruknya manajemen adalah cara berfikir dan bertindak. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Mahmudi (2010:36) memberi definisi manajemen sebagai profesi, Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. Suprihanto (2013:11) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Menurut Nawawi (2010:18) mengemukakan bahwa : manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan

sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*Planning*), mengorganisasikan (*Organizing*), memimpin (*Leading*), dan mengendalikan (*Controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar tujuan program yang dimaksudkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Pengertian manajemen menurut Handoko (2012:8) menjelaskan bahwa : manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen terdiri dari berbagai unsur (Gibson, 2010:211) yakni *man, money, method, machine, market, material dan information*.

- 1) Man : Sumber daya manusia;
- 2) Money : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 3) Method : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- 4) Machine : Mesin atau alat untuk berproduksi;
- 5) Market : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- 6) Material : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;

7) Information : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi pada sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38).

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada tidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu :

1. Fungsi strategi, meliputi :
 - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b) Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi :

- a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
 - b) Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
 - c) Pengendalian kerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi :
- a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
 - b) Hubungan dengan organisasi lain;
 - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Dari paradigma-paradigma diatas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2013:35) manajemen publik memiliki karakter antara lain :

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik yang merupakan bidang kajian yang lebih luas, karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;
- b. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit sector);
- c. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
- d. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal operations) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;

- e. Manajemen publik secara spesifik menyuaratkan tentang bagaimanakah organisasi (organizational how to) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada the managerial tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat

secara konseptual, pemberdayaan (*empowerments*) berasal dari power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Harry (2010 : 3) mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Sedangkan menurut Sulistiyani (2002 : 77) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Ungkapan yang sama juga di kemukakan oleh Pranarka dalam Sulistiyani (2004: 78) bahwa pemberdayaan mengandung dua makna yaitu : pertama *to give or authority* dimaknai sebagai pemberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua : *to give to or enable* dimaknai memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Suharto (2010 : 58) mendefinisikan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan. Serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrihatnolo (2007 : 75-76) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain, memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Mc. Ardle dalam Harry (2010 : 3) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara

konsekuen melaksanakan keputusan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pertolongan dari hubungan eksternal.

Dari defenisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat yang kondisi tidak mampu sehingga terbebas dari jeruji kemiskinan sehingga dapat bebas dari ketergantungan dari pihak lain. Begitu juga pemberdayaan yang dilakukan dalam program keluarga harapan yang mana nantinya diharapkan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan mampu keluar dari jeruji kemiskinan sehingga bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan secara umum adalah meningkatkan kemandirian individu/masyarakat yang tidak berdaya menjadi individu/masyarakat yang berdaya dan bisa mandiri secara ekonomi tidak ketergantungan kepada pihak eksternal, terdapat beberapa pendapat ahli tentang hakikat pemberdayaan masyarakat.

Sulistiyani (2004 : 80) menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu masyarakat yang mandiri, kemudian tersebut meliputi mandiri berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat yang dimaksud adalah

kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorif, afektif dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal tersebut.

Ungkap yang sama kemudian di kemukakan oleh Kristiadi dalam Wrihatnolo (2007: 117) mengungkapkan ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri : mampu mengurus dirinya sendiri, swadana : mampu membiayai kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

Dengan dipaparkan tujuan tersebut maka esensi pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya individu/masyarakat yang mandiri secara ekonomi, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

2.1.5. Indikator Pemberdayaan

Keberhasilan sebuah program pemberdayaan dapat dilihat dari indikator keberdayaan. Schuler dalam Suharto (2010 : 64) menyatakan, bahwa terdapat delapan indikator pemberdayaan yang disebut indek pemberdayaan yaitu :

- 1) Kebebasan mobilitas, seperti keluar rumah untuk kepasar, kepuskesmas dan lain-lain. Mobilitas tinggi jika individu mampu pergi sendiri.

- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu membeli kebutuhan pokok. Individu dianggap mampu jika dapat mengambil keputusan sendiri dalam memenuhi kebutuhan, terutama jika menggunakan uang sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komunitas besar, yaitu barang-barang sekunder dan tersier seperti televisi.
- 4) Keterlibatan dalam pengambil keputusan rumah tangga.
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga, misalnya melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik, seperti mengetahui nama presiden, anggota DPRD, serta mengetahui pentingnya surat nikah.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, berupa memiliki rumah, tanah, asset produktif, dan tabungan.

Kemudian Fetterman dalam Mubarak (2010 : 58) menyatakan bahwa, terdapat sepuluh prinsip-prinsip dalam efektivitas pemberdayaan yaitu meliputi :

1. *Improvement* (peningkatan)
2. *Community ownership* (kepemilikan komunitas)
3. *Inclusion* (inklusi)
4. *Democratic participation* (partisipasi demokrasi)
5. *Social justice* (keadilan sosial)
6. *Community knowledge* (tingkat pengetahuan komunitas)
7. *Evidence-based strategies* (strategi berbasis alasan)
8. *Capacity building* (pengembangan kapasitas)

9. *Organization learning* (pembelajaran organisasi)

10. *Accountability* (akuntabilitas).

2.1.6. Program Keluarga Harapan (PKH)

2.6.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dasar Hukum PKH yaitu PERKEMSOS Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial pada kelompok Keluarga Penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.

Pelaksanaan PKH mendukung pencapaian tujuan pengembangan *Millennium*. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup : pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberia bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

2.6.2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku Kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga penerima manfaat (KPM).

2.6.3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Hak-hak peserta Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaris sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Agar mendapat bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut :

A. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti dibawah ini :

Anak Usia 0-6 Tahun

- 1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

- 2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan timbangan berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD) apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

B. Ibu Hamil dan Ibu Nifas

1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.
3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

C. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran disatuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan yaitu :

- 1) apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI//SDLB/ Paket A atau SMP/MTS/SMLB atau SMP/MTS Terbuka).
- 3) jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional dipusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

- 6) Apabila anak tersebut terpaksa dijalan, atau disebut anak jalanan dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

2.1.7. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keluarga kesejahteraan adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Dimana rumah tangga dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spiritual dan

sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.1.8. Konsep Kemiskinan

2.8.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Kurniawan kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous tahun depan).

Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan. Berdasarkan pendapat tersebut mengenai kemiskinan maka dapat dipahami bahwa kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.8.2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut Menurut Chambers dalam Nasikun, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapat seseorang atau kelompok orang berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan Relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti

tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem social budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hulangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara martabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya :

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

2.8.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada pemilihan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.

- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan.

Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong, penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (2009:28-29) yaitu :

1) Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2) Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3) Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karna sumber daya alamnya miskin.

4) Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5) Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6) Beban Keluarga

Seseorang yang mampu mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.8.4. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Suparlan (1984) kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yang didefinisikan sebagai jumlah kelangkaan materi yang dialami oleh individu atau kelompok individu tertentu dibandingkan dengan standar hidup yang dapat diterima secara umum dalam budaya tertentu. Tingkat kehidupan yang rendah ini memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, kehidupan moral, dan harga diri masyarakat miskin (Annur, 2013).

Kemiskinan berkaitan dengan ketidakadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan. (Kementerian PPN/Bappenas, 2018:9).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang hanya bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jika suatu

keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka disebut keluarga miskin (Sunarti, 2006: 4-5).

Untuk mengukur kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Oleh karena itu kemiskinan dianggap secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang diukur dengan garis kemiskinan (pangan non pangan) (BPS, 2020: 36).

Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk mempertahankan kualitas hidup yang layak karena faktor-faktor seperti kekurangan uang, keterampilan, kesehatan, kontrol atas aset ekonomi atau akses informasi. Ukuran ini adalah pendekatan fisik atau moneter, pengukuran dengan pendekatan moneter dapat didasarkan pada data pengeluaran seperti pendekatan pendapatan rumah tangga. Data pengeluaran ini kemudian dibandingkan dengan nilai tukar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Batas ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Jika pengeluaran seseorang dibawah tingkat kemiskinan, mereka dikatakan sebagai penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik), untuk menghitung garis kemiskinan yang didasarkan pada data survei Sosial Ekonomi.

2.8.5. Variabel Kemiskinan

Sulistiyani (2004: 34) menyatakan bahwa terdapat berbagai variabel dalam menentukan tingkat kemiskinan. Misalnya BPS dengan indikator kebutuhan kalori 2.100 kalori perkapita perhari, Bank Dunia dengan indikator 2.200 kalori

perorangan perhari. Namun menurut Wrihatnolo (2007: 159) setelah melalui kajian mendalam berdasarkan uji statistik hasil survei BPS, disimpulkan bahwa hubungan antara 14 variabel kemiskinan dan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan non-makanan sangat paling representative menjelaskan garis kemiskinan di Indonesia.

Wrihatnolo (2007: 158) mengemukakan bahwa terdapat dua unit analisis untuk mendata rumah tangga miskin, yaitu unit wilayah dalam bentuk satuan lingkungan setempat (SLS) berupa Rukun Tetangga atau sejenisnya, serta unit rumah tangga yang ditentukan berdasarkan empat belas (14) variabel inti berikut ini :

- a. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi,
- b. Jenis lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah,
- c. Jenis dinding rumah berupa bambu atau papan dengan kualitas rendah,
- d. Fasilitas kamar mandi belum ada,
- e. Sumber air minum bukan air bersih,
- f. Penerangan yang digunakan bukan listrik,
- g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang,
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali,
- i. Tidak memiliki kemampuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu,
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga,

- k. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik,
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan atau perkebunan,
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD atau belum sekolah,
- n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp 500.000.

2.1.9. Efektivitas Kebijakan

2.9.1. Pengertian Efektivitas Kebijakan

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi & bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga 11 atau organisasi dapat tercapai.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya mengiginkan

adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun pengertian Efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Siagian Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin dekat sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. (Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007).

Pengertian lain dikemukakan oleh Agung Kurniawan (2005:109) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada satu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Richard M. Steers dalam Waluyo (2007:85) Efektivitas itu sebagai mendapat keuntungan yang banyak, tetapi juga efektivitas itu diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu kegiatan dapat menggunakan teori lima tepat yang dikemukakan oleh Matland dalam bukunya Nugroho yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar sesuai prosedur, sedangkan efektif apabila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan dengan hasil yang bermanfaat. Sehingga Efektivitas kebijakan dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan, apakah memberikan hasil sesuai dengan yang menjadi tujuan program atau tidak.

2.9.2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum teori efektivitas merupakan sebuah konsep untuk mengukur produktivitas. Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu. Gibson (2002) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran

yang telah disepakati bersama. Menurut Dunn (2003) efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Pengukuran terhadap konsep efektivitas menurut Makmur (2008) adalah keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan. Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses (conversion), dan keluaran (output). Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi, sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
- b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007).

Menurut pendapat Mahmud Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, akan semakin efektif pula suatu organisasi, program atau

kegiatan yang telah dirancang. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely (Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994).

Komaruddin menambahkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian Hidayat mengatakan bahwa efektivitas adalah sebuah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. (Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, ada empat hal merupakan unsur-unsur efektivitas yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang ditentukan.

- 3) Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- 4) Hasil, sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan waktu dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan padanya.

2.9.3. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Upaya mengukur tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak efektif.

Menurut Kartiawati (2017), menyatakan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukur terhadap sejauh mana keberhasilan bantuan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM).

Menurut Sutrisno Dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program

Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga disampaikan menurut Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah sosialisasi program.

2. Tepat Sasaran

Menurut Budiani Dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Tepat Waktu

Katepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting dalam program PKH.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dana target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini disampaikan diteori yang dikemukakan oleh Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Danin dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan efektif apabila semua indikator berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Menurut Sutrisno (2007, 125-126), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman Program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Tepat Sasaran

Ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada

masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting didalam program PKH.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu tolak ukur penulis untuk menentukan Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

2.1.10. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (Program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Implementasi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menerjemahkan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam tindakan. Menurut

Parson (2005; 456) mengartikan bahwa implementasi adalah bentuk pelaksanaan kebijakan dengan cara lain. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tersebut adalah proses yang terus bergerak, yaitu implementor pelaksanaan melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pelaksanaan itu.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefenisikan implementasi yaitu sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Awang (2010:32) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi

kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application yakni sebagai berikut :

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

2.1.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu/kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan landasan atau bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Indrawan Email : dawan_organ@yahoo.co.id Jurnal Simplex Vol. 2 No. 3 Desember 2019 https://fe.ummetro.ac.id	Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)	Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami natural setting sebagai sumber langsung.	Hasil Penelitian Terdahulu : Kualitas PKH dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan program bantuan langsung lainnya seperti BLSM atau BLT. PKH dinilai lebih baik karena mengkombinasikan skema bantuan tunai yang selanjutnya berubah menjadi non tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada fasdik dan faskes. Perbedaan : dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pendamping PKH.
2.	Felinda Wulandari, Yamardi dan Titin Rohayatin Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 1 juni 2020	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di	Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian : menunjukkan bawa belum efektif dikarenakan waktu pemberian dana PKH yang tidak konsisten terhadap waktu yang telah

	https://ejournal.fisip.unjani.ac.id	Kecamatan Padalarang kabupaten Bandung Barat			<p>ditentukan, dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH.</p> <p>Perbedaan : dengan penelitian ini yaitu pemberian dana yang tidak tepat waktu.</p>
3.	<p>Sabinus Beni dan Blasius Manggu E-mail : beni@shantihuana.ac.id</p> <p>Sosio Konsepsia Vol. 9, No. 02, 14 April 2020</p> <p>https://researchgate.net</p>	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)	Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode pelengkap dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.	<p>Masih banyak kekurangan yang menurut peneliti harus diperbaiki oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Indonesia, Khususnya Perbatasan Jagoi Babang.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini permasalahan pokok peneliti adalah tingginya tingkat putus sekolah dan partisipasi pemeriksaan kesehatan masyarakat.</p>
4.	<p>Nurul Infitah, Sukidin dan Wiwin Hartanto e-mail : nurulinfitah</p>	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa	Program Keluarga Harapan (PKH)	menggunakan metode jenis probability sampling	PKH telah efektif dari aspek input dan proses, artinya KPM telah tepat sasaran dan proses PKH

	<p>@gmail.com</p> <p>Jurnal Pendidikan Ekonomi ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 Vol. 12 No 1 (2018)</p> <p>DOI : https://10.19184/jpe.v13i2.11346</p>	Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember		dengan teknik proportionate stratified random sampling.	<p>juga telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial, sedangkan PKH belum efektif dari aspek output bidang kesehatan.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang belum efektifnya PKH.</p>
5.	<p>Greaccela Alda Rahma Dany dan Siti Maizul Habibah Email : greaccela.17040254063@mhs.unesa.ac.id sitihabibah@unesa.ac.id</p> <p>jurnal kajian moral dan kewarganegaraan. Vol. 09 No. 02 Tahun 2021, 435-452</p> <p>https://ejournal.unesa.ac.id</p>	Efektivitas BLT Bagi Warga Non-PKH Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Susun Sudimoro	BLT Bagi Warga Non-PKH Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19	Kuantitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan : efektivitas Bantuan langsung tunai sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama pandemi covid-19 memiliki presentase yang tinggi yakni sebesar 80,8% secara keseluruhan.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah peneliti membahas tentang Non-PKH selama Covid-19.</p>
6.	<p>Nuraida Email : nuraida_74@yahoo.co.id Vol. 1 Issue 2, Desember</p>	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan (PKH)	Penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif,	Berdasarkan hasil penelitian : tujuan dari Program Keluarga Harapan belum berjalan efektif, karena

	<p>2019</p> <p>https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik</p>	<p>(PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang</p>		<p>yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi dilapangan .</p>	<p>sebagian besar KPM belum bisa hadir di fasilitas pendidikan dan kesehatan walaupun ada sebagian KPM yang sudah bisa merubah pola pikirnya untuk keluar dari kemiskinan.</p> <p>Perbedaan dengan Peneliti ini : adalah Tujuan PKH belum sepenuhnya berjalan efektif.</p>
7.	<p>Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh Email : Sutji_fisip@yahoo.co.id</p> <p>Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) Vol. 2 No. (2), Oktober 2019</p> <p>http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/igj</p>	<p>Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal</p>	<p>Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Metode Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif sebagai instrument , berfungsi menetapkan fokus penelitian.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian : jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu : penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok keluarga penerima manfaat (KPM).</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di</p>

					Desa.
8.	<p>Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati</p> <p>Jibes : Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis E- ISSN : Vol. 1 No. 1, 2022</p> <p>https://journal.ar-raniry.ac.id</p>	<p>Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tantan Kabupaten Aceh Barat Daya)</p>	<p>Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Metode Kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik analisis data meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian : kendala yang dialami pendamping PKH dalam menjalankan program PKH adalah berupa melakukan pendampingan peserta PKH ke pihak Bank untuk pembuatan buku tabungan, selain itu kendala tersebut pendamping PKH juga mengalami kendala berupa penjelasan kepada peserta PKH bahwa dana PKH tersalurkan bertahap atau tidak sekaligus.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : membahas tentang Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19.</p>
9.	<p>Lini dan Wahyu Subadi Email : lini5409@gmail.com wahyusubadi5@gmail.com</p>	<p>Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Puain Kiwa Kecamatan</p>	<p>Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)</p>	<p>Metode deskriptif dengan teknik Kualitatif.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian : masih kurangnya pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan</p>

	<p>JAPB : Vol. 4 No. 1, 2021 ISSN : 2723-0937</p> <p>Http://jurnal.sitiatabalong.ac.id/index.php/JAPB</p>	n Tanjung Kabupaten Tabalong			<p>yang tidak tepat sasaran terhadap keluarga yang mampu.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah tidak tepat sasaran.</p>
10.	<p>Soni Akhmad Nulhaqim Nandang Alamsah Deliarnoor dan Taqiya Arini Putri</p> <p>Central Asia And The Caucasus</p> <p>Vol. 23 Issue 1 2022 DOI : https://doi.org/10.37178/c-a-c.23.1.300</p>	<p>Hope Family Program Social Assistance : (Implementation In Indonesia And Digital Platform Adaptation As A Strengthening Step)</p>	<p>Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan : adaptasi platform digital sebagai langkah penguatan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam yang didukung oleh data sekunder.</p>	<p>Proses pelaksanaan PKH juga mencakup pemanfaatan media digital untuk diseminasi dan rekapitulasi data.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : membahas tentang penyaluran bansos kepada anggota PKH.</p>
11.	<p>Zaman Zaini dan Muhammad Nata Nugraha</p> <p>Journal of Indonesia law & Policy Review Vol. 3, No. 2. February 2022</p> <p>https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirp/article/view/64/57</p>	<p>The Effect Of Implementation Of The Hope Family Program On The Fulfilment Of Basic Food Needs Of Beneficiaries Family During The Covid-19 Pandemic On</p>	<p>Program Keluarga Harapan Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pangan Dasar Dari Keluarga Penerima Manfaat Selama Pandemi Covid-19.</p>	<p>Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan situasi yang akan diteliti</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, terlihat bahwa PKH memiliki pengaruh yang positif dan kuat dalam memenuhi kebutuhan sembako Keluarga Penerima Manfaat.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : membahas Tentang Pemenuhan</p>

		Jatisampurna District, Bekasi city		disertai dengan studi literatur.	Kebutuhan Pangan Dasar Dari Keluarga Penerima Manfaat Selama Pandemi Covid-19.
12.	<p>Utami Ningsih Darwis Email : Utaminingsihdarwis15@gmail.com</p> <p>Journal of Management Vol. 12 No. 2 2022 e-ISSN 2721-7787 www.enrichment.iocspublisher.org</p>	Implementation of Family Hope Program (PKH) in Palopo	Program Keluarga Harapan (PKH)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif Kualitatif sebagai pendekatan litatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur.	<p>Hasil penelitian menunjukkan : bahwa PKH di Kecamatan Telluwanua tentang pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan petugas hanya dilaksanakan antara Penerima Program PKH dengan petugasnya. Namun masih ada kekurangan dukungan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam program atau dukungan publik.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah data yang diperoleh belum lengkap masih ada yang penerima PKH yang belum dimasukkan.</p>
13.	Ratna Frenty Nurkhalim, Sukamdi dan Djauhar Ismail	Mixed Method Study On Evaluation Of The Impact Of	Dampak Program Keluarga Harapan Tentang Berat	Metode penelitian yang digunakan adalah kohort	Pemerintah harus lebih memantau penggunaan biaya PKH untuk makanan bergizi konsumsi dan

	International Conference on Public Health Solo, Indonesia, Vol. 18. No.19 November 2020 https://doi.org/10.26911/thicph-FP.02.08	The Family Hope Program On Birth Weight In Nganjuk, East Java	Lahir.	retrospektif dengan kombinasi kuantitatif dan pendekatan kualitatif.	pemantauan kenaikan berat badan lahir selama kehamilan, tidak hanya berfokus pada angka dari pemeriksaan ANC. Perbedaan dengan penelitian ini : adalah membahas tentang dampak Program Keluarga Harapan.
14.	Lies Kumara Dewi, Eka Ubaya Taruna Rauf, Husna Purnama dan Adi Pramana International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET) Vol. 1 Issue 2, April 2022 E-ISSN 2809-5960 http://journal.sinergicendikia.com/index.php/ijeset	Implementation of The Family Hope Program in Poverty Reduction in Cilimus Village Teluk Pandan District Pesawaran Regency	Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Metode penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif ekspresif dengan metodologi subjektif.	Hasil penelitian menunjukkan : bahwa pelaksanaan PKH belum efektif, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima PKH manfaat, dan penerima PKH belum memiliki kesadaran untuk tidak menerima PKH bagi masyarakat yang sudah sejahtera. Perbedaan dengan penelitian ini : tentang meningkatnya jumlah keluarga penerima PKH.
15.	Arieyanti Syamputri, Sonny	The Influence of	Program Keluarga Harapan	Metode yang digunakan	Hasil penelitian : tentang Kinerja Keluarga

	<p>Hersona GW dan Hartelina</p> <p>Enrichment : Journal of Management Vol. 2 No. 2 2022 e-ISSN 2721-7787</p> <p>www.enrichment.iocspublishing.org</p>	<p>Compensation on the Performance of Program Keluarga Harapan (Pkh) at The Karawang District Social Services</p>	(PKH)	<p>adalah explanator y research adalah assosiatif.</p>	<p>Fasilitator PKH di Dinas Sosial Kabupaten Karawang bahwa pengaruh Kompensasi pada kinerja karyawan masih belum optimal.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah membahas mengenai kinerja keluarga fasilitator PKH.</p>
16.	<p>Ade Nur Istiani dan M. Mansyur KOMUNIKA V No. I (2022) e-ISSN: 2615-5206</p> <p>http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika</p>	<p>Analysis of Communication Media Assistance On The Program Keluarga Harapan (PKH) In The Implementation of Family Development Session (FDS)”</p>	<p>Program Keluarga Harapan (PKH) Sesi Pengembangan Keluarga (FDS)”</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan : Media Komunikasi berupa video, flipcart dan buku pintar yang digunakan oleh pendamping PKH dalam Proses keluarga sesi pengembangan, sangat memudahkan ibu-ibu menerima materi dari pendamping, dan berkesan baik bagi ibu-ibu peserta PKH.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : membahas mengenai Sesi Pengembangan Keluarga (FDS).</p>
17.	<p>Aras Solong dan Dzulqarnain</p>	<p>The Effectiveness of the</p>	<p>Program Keluarga Harapan</p>	<p>Metode Kualitatif, melalui</p>	<p>Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa</p>

	<p>International Journal of Social Science Research and Review Vol 5, Issue 7 July, 2022</p> <p>http://ijssrr.com editor@ijssrr.com</p>	<p>Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction in Indonesia</p>	<p>Dalam Pengurangan Kemiskinan di Indonesia.</p>	<p>analisis data deskriptif dari tuturan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati.</p>	<p>dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator yang kurang memuaskan. mengenai data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan data di lapangan.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini : adalah membahas mengenai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia.</p>
18.	<p>Rita Yuniarti, Najiya Arroisi, Sugih Bhakti Arifita dan Mohd Haizam Saudi.</p> <p>Central Asia And The Caucasus Vol. 23 Issue 1 2022</p> <p>DOI : https://doi.org/10.37178/c-a-c.23.1.289</p>	<p>The Effect of Government Internal Control System on Fraud Prevention (Case Study on Family Hope Program Operator Tasikmalaya)</p>	<p>Pengendalian Internet Pemerintah terhadap pencegahan penipuan pada operator Program Keluarga Harapan.</p>	<p>Metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus.</p>	<p>Berdasarkan Hasil penelitian : bahwa sistem pengendalian internet pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan penipuan.</p> <p>Perbedaan dengan Penelitian ini : adalah mengenai pengendalian internet pemerintah terhadap pencegahan penipuan.</p>

Dari penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji Efektivitas Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis tentu penelitian ini akan menghasilkan output berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

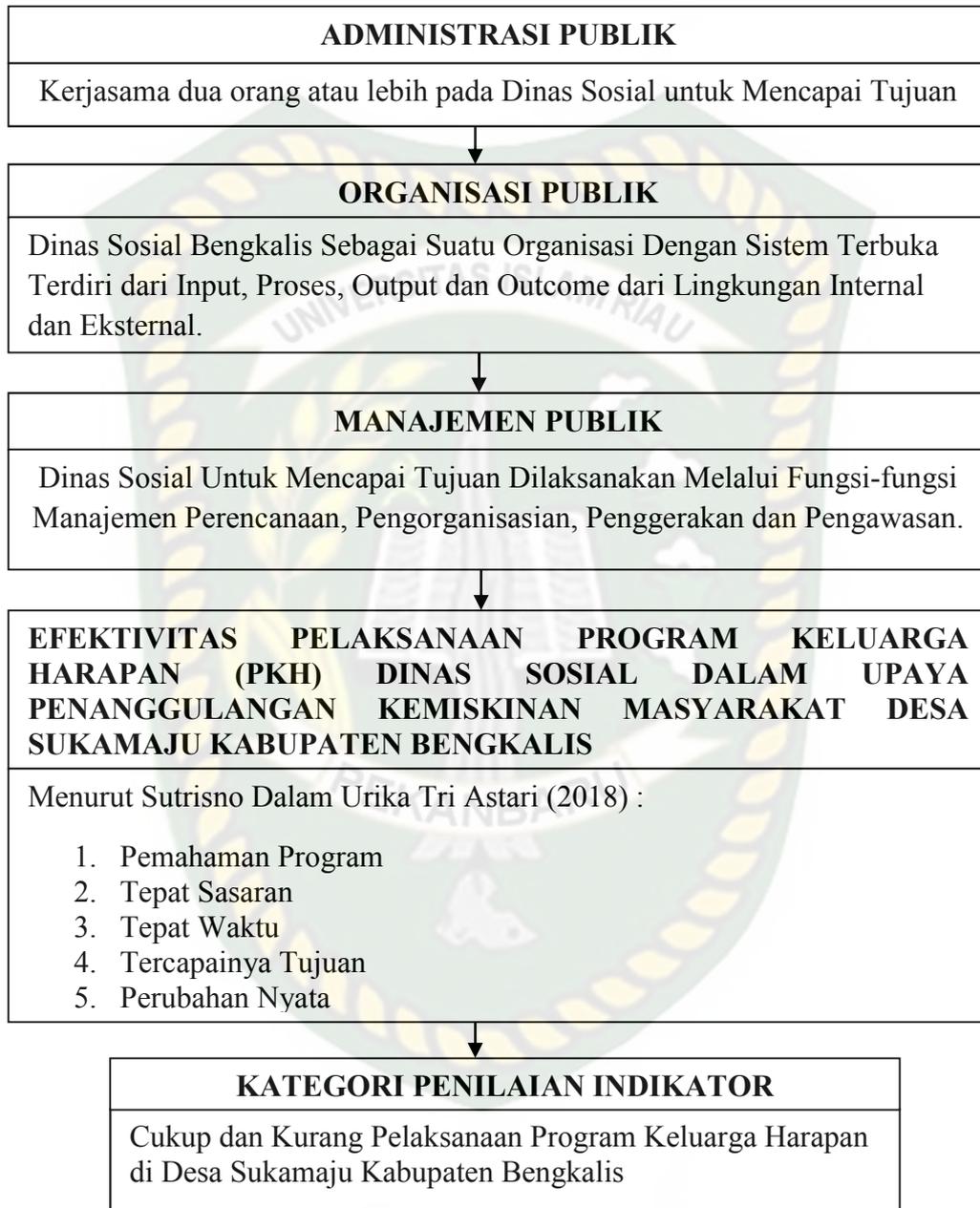
Perbedaan Penelitian saya dengan Peneliti sebelumnya adalah, penelitian saya membahas tentang Bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran dan bantuan yang diberikan dipergunakan untuk keperluan diluar itu, sedangkan peneliti sebelumnya adalah pengetahuan dan sosialisasi Program Keluarga Harapan yang dilakukan petugas hanya dilaksanakan antara penerima PKH dengan petugasnya, namun masih ada kekurangan dukungan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam program atau dukungan publik.

2.1.12. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran dari penulis sendiri ataupun mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan berfokus pada judul penelitian dan bisa menjawab masalah-masalah yang ada pada rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yang didasari oleh keinginan tujuan penulis terhadap penyaluran, bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Bantuan dana program keluarga harapan disalurkan dibidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial. Setiap bidang ada persyaratan berbeda-beda yang harus dipenuhi oleh peserta program keluarga harapan.

Oleh karena itu untuk mengetahui efektif atau tidak dana program keluarga harapan yang disalurkan rumah tangga miskin, penulis menggunakan indikator Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan berupa indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata.



Gambar 2.2 : Kerangka Pikir Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

2.1.13. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan dan membatasi operasional penelitian. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahaman, maka dioperasikan beberapa konsep yang dipakai penulis sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan kegiatan manusia yang berlangsung berupa proses pengendalian interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk kerja sama. Interaksi yang disebut kerja sama itu adalah gejala sosial, yang bilamana dikendalikan dengan mempergunakan administrasi, akan berlangsung efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu pada bekerja untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama dengan alat-alat yang tepat. organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*Planning*), mengorganisasikan (*Organizing*), memimpin (*Leading*), dan mengendalikan (*Controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat yang kondisi tidak mampu sehingga

terbebas dari jeruji kemiskinan sehingga dapat bebas dari ketergantungan dari pihak lain.

5. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
6. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yang didefinisikan sebagai jumlah kelangkaan materi yang dialami oleh individu atau kelompok individu tertentu dibandingkan dengan standar hidup yang dapat diterima secara umum dalam budaya tertentu. Tingkat kehidupan yang rendah ini memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, kehidupan moral, dan harga diri masyarakat miskin.

8. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukur terhadap sejauh mana keberhasilan bantuan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM). Menurut Sutrisno Dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga disampaikan menurut Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah sosialisasi program.

2. Tepat Sasaran

Menurut Budiani Dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Tepat Waktu

Katepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting dalam program PKH.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini disampaikan teori yang dikemukakan oleh Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Perubahan Nyata

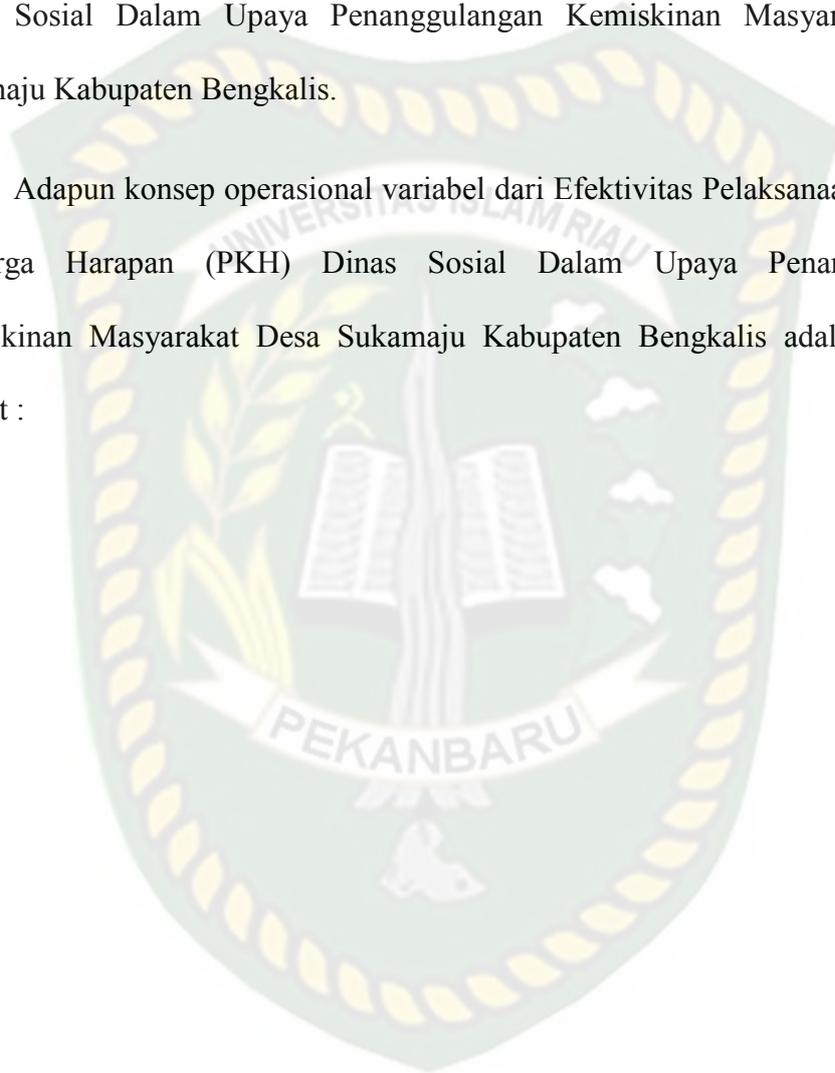
Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Danin dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi.

9. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

2.2. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

Adapun konsep operasional variabel dari Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 : Konsep Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Sutrisno Dalam Urika Tri Astari (2018), Efektivitas dapat diukur dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Program 2. Tepat Sasaran 3. Tepat Waktu 4. Tercapainya Tujuan 5. Perubahan Nyata 	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Program 2. Tepat Sasaran 3. Tepat Waktu 4. Tercapainya Tujuan 5. Perubahan Nyata 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Sosiolisasi Program Kepada Masyarakat. b. Pelaksanaan Program dapat diterima dilingkungan Masyarakat. a. Sasaran yang sesuai dengan tujuan Program. b. Pelaksanaan program mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. a. Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKH sudah sesuai dengan waktu yang seharusnya. b. Waktu pencairan dana terealisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. a. Meningkatnya Taraf Pendidikan Peserta PKH. b. Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Peserta PKH. a. Program dapat mengatasi masalah kemiskinan. b. Memberi keuntungan bagi masyarakat.

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan analisis data yang utama adalah observasi, teknik penunjang studi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Arikunto (2010:3), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Metode deskriptif Kualitatif dalam Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis, serta apa-apa saja faktor penghambat Program Keluarga Harapan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait dengan sasaran peneliti.

Dengan kata lain, penelitian Kualitatif adalah peneliti yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, prilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul Penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan meneliti di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini dipilih karena terdapat beberapa fenomena-fenomena permasalahan yang menghambat pelaksanaan PKH, sehingga prosesnya tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambaran peristiwa dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri.

3.3. Informan dan Key Informan

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan juga dikatakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan penelitian dalam peneliti ini penulis mengambil beberapa orang yang terdiri dari KASI Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten Bengkalis (Dedi Irawan, SE. SY), Pegawai Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis (M. Syahendra, A.Md), Pendamping PKH Desa Sukamaju (Solihin, SE), 5 Peserta yang menerima PKH dan 3 Peserta yang tidak menerima PKH.

Key Informan adalah orang yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sesuatu sumber yang dibutuhkan. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis (Dra. Hj. Martini, MH.).

Tabel 3.1 Informan dan Key Informan

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bengkalis	1	1	Key Informan
2.	KASI Jaminan Sosial Keluarga	1	1	Informan
3.	Pegawai Bidang Bantuan Sosial	5	5	Informan
4.	Pendamping PKH Desa Sukamaju	1	1	Informan
5.	Peserta Penerima (PKH)	108	5	Informan
6.	Peserta yang Tidak Menerima PKH	20	3	Informan
Jumlah		136	16	-

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang ingin diketahui sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan

teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang diteliti untuk dimintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan meneliti di Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama misalnya individu atau perorangan seperti, hasil wawancara, atau bukti transaksi (Husein Umar : 2004 : 64). Data primer ini diperoleh dari :

- a) Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan Program Keluarga Harapan.
 - b) Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
 - c) Hasil Dokumentasi penelitian berupa foto-foto pelaksanaan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.
- b. Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Buku Panduan Bimtek Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial RI.
2. Buku kerja Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan.
3. Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2016.
4. Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos NON Tunai Program keluarga Harapan.
5. Monografi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data disimpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis baik instansi yang berkaitan dengan keluarga penerima manfaat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Pendamping Sosial maupun keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian :

Hal-hal yang di observasi peneliti sebagai berikut :

1. Observasi dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci.
2. Mengamati Prilaku Keluarga penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan.

3. Mengamati Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkhusus di Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara (Interview)

Cara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang sedang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Bengkalis, KASI Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Peserta Penerima (PKH) dan orang-orang tertentu yang terkait dengan Penelitian. Menurut Sudjanah dalam Djam'an Satori (2014 : 130) Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatapan muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan dampak Program

Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam Emzir (2010:169) berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada analisa pada Efektivitas Pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait analisis Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

c. Penarikan atau verifikasi kesimpulan

Setelah semua data yang berkenaan dengan Analisis Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis, dan faktor-faktor penghambat didapat, serta mengaitkan dengan teori, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikir dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian bertujuan agar tersusunya secara jelas kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis, Berikut dapat dilihat tabel 3.2 terkait jadwal penelitian yang telah tersusun sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke Tahun 2022																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP	■																			
2	Seminar UP						■														
3	Riset							■													
4	Penelitian Lapangan								■												
5	Pengelolaan dan Analisis Data										■										
6	Konsultasi Bimbingan Tesis											■									
7	Ujian Tesis												■								
8	Revisi Tesis														■						
9	Pengadaan serta Penyerahan Tesis															■					

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibu kotanya Bengkalis di pimpin oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II. Kabupaten Bengkalis dengan beribu kota Bengkalis dan Kabupaten ini berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.

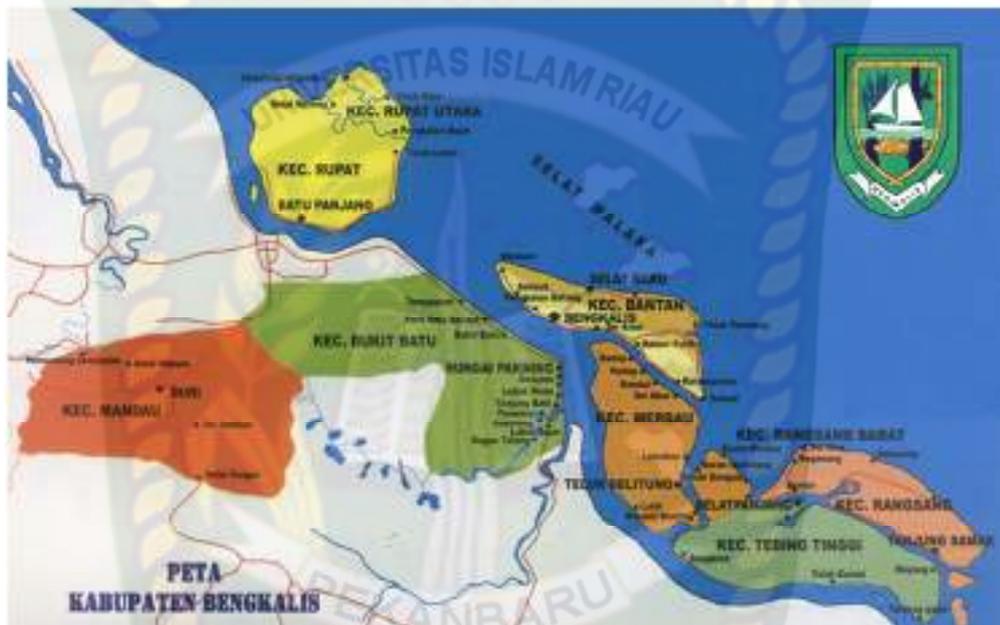
Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, dikarenakan dilalui oleh jalur kapal-kapal besar internasional paling sibuk di dunia. Yakni selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS-GT). Wilayahnya mencakup pada bagian timur Pulau Sumatera antara 2°30 Lintang Utara (L,U), -0°17 Lintang Utara (LU) atau 100°52 Bujur Timur (BT), -102°52 Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur (BT) dan dengan luasnya 7.793,93 km² meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 446 km² yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kabupaten Meranti dan Kabupaten Karimun

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.



Gambar IV.I Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2022.

Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol. Yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Dataran rendahnya dengan rata-rata ketinggian 2-6, 1 meter diatas permukaan laut. Tercatat sebanyak 17 Pulau Besar dan beberapa pulau kecil termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai siak dengan panjang 300

Km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 Km. Kabupaten Bengkalis mempunyai Iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26°C - 32°C, dengan kelembapan 85%. Musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Januari dengan cerah hujan rata-rata berkisar antara 900-1.500 MM/Tahun. Sedangkan musim kemarau berlangsung pada bulan Februari hingga Agustus. Selain itu juga, kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim yakni angin utara, timur, barat, dan selatan.

Secara Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bengkalis memiliki 8 Kecamatan dan 102 Kelurahan/Desa pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014, telah aktif 53 desa baru hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 tahun 2012 sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 155 desa/kelurahan.

Tabel IV.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kab Bengkalis.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mandau	937,47	293.513
2	Pinggir	2.503,00	8.6535
3	Bukit Batu	1.128,00	32.840
4	Siak Kecil	742,21	20.220
5	Rupat	896,35	33.063
6	Rupat Utara	628,50	14.201
7	Bengkalis	514,00	78.571
8	Bantan	424,40	39.044
	Jumlah	7.773,93	543.987

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, 2021.

Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat Heterogen dengan mayoritas beragama islam. Selain suku melayu yang merupakan suku khas, penduduk

Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda, dan Tiong Hoa. Dan Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten dikenal juga dengan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakatnya dengan rasa yang sangat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan terubuk ini menjadi amat mahal. Berkembangnya Kabupaten ini juga didukung adanya pertambangan minyak di Kecamatan Mandau Duri, dari pertambangan minyak ini menghasilkan minyak dan gas yang menjadi sumber terbesar APBD Kabupaten Bengkalis.

4.2 Profil Singkat Desa Sukamaju

Terbentuknya Desa Sukamaju pada awalnya adalah wilayah Dusun Budi Luhur yang terdiri dari RW 01 (Sei. Raya) RW 02 (Sukajadi) RW 10 (Proyek) dari wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Wilayah dusun budi luhur yang terdiri dari 3 RW hampir setengah dari wilayah Desa Teluk Pambang (Desa Induk).

Berdasarkan hasil mufakat/musyawarah kesepakatan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda bersama pemerintah desa. (Desa Teluk Pambang) dimekarkan/dipecahkan menjadi 3 Desa baru dan 1 Desa Induk (Desa lama Desa Teluk Pambang) maka keseluruhan Desa Teluk Pambang menjadi 4 Desa satu dari empat Desa itu adalah wilayah dari dusun budi luhur untuk dijadikan satu desa baru yaitu Desa Sukamaju.

Desa Sukamaju merupakan daerah yang datar yang sebagian wilayahnya terdapat anak sungai yang digunakan sebagai mata pencaharian sebagian

masyarakat Desa Sukamaju, wilayah Desa Sukamaju merupakan wilayah yang strategis untuk jarak tempuh kecamatan maupun kabupaten. Adapun perbatasan wilayah Desa Sukamaju dengan :

- Sebelah Utara : Desa Muntai yang merupakan Desa Induk
- Sebelah Selatan : Desa Kembang Baru yang merupakan Desa Pemekaran
- Sebelah Timur : Desa Pambang Baru yang merupakan Desa Pemekaran
- Sebelah Barat : Desa Pematang Duku Timur yang merupakan Desa Pemekaran.

Bentang wilayah Desa Sukamaju 100 KM, hampir 60% penduduk Desa Sukamaju menganut agama budha dan sebagai besar memanfaatkan hasil alam untuk dijadikan mata pencaharian. Desa Sukamaju memiliki 5 kepala wilayah/atau Dusun, 10 ketua rukun warga dan 39 rukun tetangga.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SekDa). Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi, yakni :

Visi :

- Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi :

- Mewujudkan Perlindungan, Jaminan, Rehabilitas, dan Pelayanan Sosial bagi PMKS.
- Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial melalui kelembagaan Sosial.
- Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ditetapkan beberapa tujuan, yakni :

1. Meningkatkan sistem pelayanan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup anak panti dan meningkatkan peran serta kelembagaan sosial lainnya.
3. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, KAT) dan PMKS lainnya.
4. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (penyandang cacat dan penyakit sosial) dan PMKS lainnya.

Berikut adalah Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 42 tahun 2016 tanggal 30 November 2016 :



Gambar IV.2 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

Sumber : kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

4.4 Fungsi Dan Tugas Organisasi

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.5 Sumber Daya Organisasi

Sumber daya di dalam organisasi adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang segala proses menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia sendiri yakni orang-orang yang menjabat (ASN) melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

Tabel IV.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas
2	Pejabat Administrator	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Pejabat Pengawasan	19	Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD
4	Pegawai ASN Golongan IV	1	Staf
5	Pegawai ASN Golongan III	6	Staf
6	pegawai ASN Golongan II	29	Staf
7	Pegawai Honorer	79	Tenaga Administrasi, Kebersihan, supir dan Keamanan
Jumlah		140	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021.

Setiap jabatan tersebut, mereka memiliki uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
3. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis.

b. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tugas Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas dan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
2. Perlindungan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas dan fungsinya adalah :

1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas diluar panti dan lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan

kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.

6. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
7. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti lembaga.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas dan Fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evakuasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evakuasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun non tertulis.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas dan Fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan.
3. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miski perkotaan.

4. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.
5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4.6 Tugas Dan Fungsi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber daya manusia PKH direkrut, diseleksi dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Penggunaan sumber daya manusia disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Negara. Adapun tugas dan fungsi sumber daya manusia PKH secara umumnya sebagai berikut :

1. Penasihat Nasional

Penasihat nasional berada dibawah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan bertanggung jawab kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga Penasihat nasional bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,

lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

2. Tenaga Bantuan Teknis

Bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi validasi, terminasi, bantuan sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

3. Tenaga Ahli

Tenaga ahli bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

4. Koordinator Regional

Koordinator regional bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH untuk :

- a) Memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan ditingkat regional
- b) Memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan ditingkat regional
- c) Membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan ditingkat regional
- d) Pengelolaan penanganan pengaduan ditingkat regional
- e) Melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

- f) Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH ditingkat regional
- g) Memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

5. Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk :

- a) Memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan ditingkat daerah provinsi
- b) Memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan ditingkat daerah provinsi
- c) Membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
- d) Pengelolaan penanganan pengaduan ditingkat daerah provinsi
- e) Melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f) Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH ditingkat provinsi
- g) Memberikan penilaian kinerja koordinator kabupaten/kota dan administrator pangkalan data wilayah kerjanya.

6. Koordinator Kabupaten/Kota

Bertugas membantu kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH

ditingkat kabupaten/kota dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data wilayah kerjanya.

7. Pekerja Sosial Supervisor

Bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping sosial diseluruh wilayah dampingan, melaksanakan pembahasan kasus (*case conference*) dalam pelaksanaan P2K2, melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian isu, keluhan dan kasus, menyusun menyebar luaskan informasi pelaksanaan PKH melalui berbagai media.

8. Pendamping Sosial

Bertugas melaksanakan tugas pendamping PKH disetiap kecamatan.

9. Asisten Pendamping Sosial

Bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendamping PKH dikecamatan.

10. Administrator Pangkalan Data

Bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan mendistribusikan data PKH dipusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dalam suatu penelitian banyak sekali muncul pertanyaan dari pembaca, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari key informan dan irforman penelitian, pertanyaan ini sangatlah wajar. Jadi pada dasarnya dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk menjelaskan identitas key informan dan informan, key informan dan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang di perkirakan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan tepat dan jelas. key Informan tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dan informan nya adalah Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Pendamping PKH Desa Sukamaju, Peserta Penerima PKH, dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH).

Dalam penelitian tentang Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis ini peneliti akan menjelaskan tentang identitas key informan dan informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin, usia dan pendidikan key informan dan informan.

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Identitas Key informan dan Informan Penelitian Tentang Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dra. Hj. Martini, MH	Kepala Dinas Sosial	Key Informan
2.	Dedi Irawan, SE, SY	KASI Jaminan Sosial	Informan
3.	Martias, SP	Pegawai Bansos	Informan
4.	Andri Hamzah, SE, M.Si	Pegawai Bansos	Informan
5.	Maiyusra SN, S.Sos	Pegawai Bansos	Informan
6.	M. Syahendra, A.Md	Pegawai Bansos	Informan
7.	Susi Susanti, SE	Pegawai Bansos	Informan
8.	M. Solihin, SE	Pendamping	Informan
9.	Saliah	Keluarga Penerima PKH	Informan
10.	Poniran	Keluarga Penerima PKH	Informan
11.	Aniem	Keluarga Penerima PKH	Informan
12.	Tuti	Keluarga Penerima PKH	Informan
13.	Kateno	Keluarga Penerima PKH	Informan
14.	Katijem	Masyarakat Miskin Yang Tidak Mendapatkan Bantuan PKH	Informan
15.	Jumin	Masyarakat Miskin Yang Tidak Mendapatkan Bantuan PKH	Informan
16.	Tugiatin	Masyarakat Miskin Yang Tidak Mendapatkan Bantuan PKH	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan yang peneliti gunakan dalam observasi ini berjumlah satu orang, lima belas orang informan adalah satu orang Kasi Jaminan Sosial Keluarga, lima orang Pegawai Bidang Bantuan Sosial, satu orang Pendamping PKH Desa Sukamaju, lima orang Peserta Penerima PKH, tiga orang masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH), dan satu orang key informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

1. Usia Key Informan dan Informan

Usia adalah faktor yang dapat memberikan kejelasan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Usia key informan dan informan yang sesuai akan memudahkan penganalisisan dan pemahaman key informan dan informan terhadap pertanyaan wawancara yang diberikan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria usia key informan dan informan, yaitu :

Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kriteria Usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah
1.	30-40	6
2.	40-50	6
3.	50-60	4
Jumlah		16

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa key informan dan informan terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Pendamping PKH Desa Sukamaju, Peserta Penerima PKH, Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sukamaju terdiri dari 6 orang dengan kriteria usia 30-40 Tahun, 6 orang dengan kriteria usia 40-50 Tahun, dan 4 orang dengan kriteria usia 50-60 Tahun.

2. Jenis Kelamin

Pada suatu penelitian, jenis kelamin key informan dan informan tidak mempengaruhi hasil penelitian selama key informan dan informan memberikan informasi yang benar adanya. Jenis kelamin tidak mempengaruhi hasil penelitian karena tidak dijadikan acuan untuk menentukan cara berfikir maupun pemahaman terhadap suatu masalah penelitian.

Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan dalam Penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	8
2.	Wanita	8
	Jumlah	16

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informan dan informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Pendamping PKH Desa Sukamaju, Peserta Penerima PKH, Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sukamaju terdiri dari 8 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 8 orang berjenis kelamin perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian tanggapan yang diberikan key informan dan informan tidaklah sama persis, hal ini dikarenakan berbedanya tingkat pemahaman key informan dan informan terhadap masalah yang ada didalam

penelitian, dan berbeda pemahaman tersebut dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkan oleh masing-masing key informan dan informan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan Di Desa Sukamaju, dapat dilihat tingkat pendidikan key informan dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 Identitas Key Informan dan Informan dalam Penelitian Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	5
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
4.	Diploma III (D3)	1
5.	Strata I (S1)	3
6.	Strata II (S2)	3
7.	Strata III (S3)	1
Jumlah		16

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa key informan dan informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Pegawai Bidang Bantuan Sosial, Pendamping PKH Desa Sukamaju, Peserta Penerima PKH, Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sukamaju berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 5 orang berpendidikan SD, 3 orang berpendidikan SMP, 1 orang berpendidikan D3, 3 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan S2, dan 1 orang berpendidikan S3.

5.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian

Menurut Efektivitas Ravianto (dalam Masruri, 2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Untuk dapat mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari beberapa indikator penelitian dibawah ini :

1. Pemahaman Program

Pemahaman Program merupakan sejauh mana masyarakat dan pengelola program keluarga harapan mengetahui dan memahami tentang program ini. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat memahami program ini dengan baik, persyaratan yang harus diikuti maupun ketentuan penggunaan dana bantuan yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 November 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

”Menurut saya pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan sudah sangat baik dilakukan di Kabupaten Bengkalis dilakukan dua kali dalam satu tahun, selain melalui rapat koordinasi juga dilakukan di setiap kecamatan oleh SDM Program Keluarga Harapan dan di kabupaten disampaikan oleh Kepala Dinas melalui rapat koordinasi”.

Dari wawancara peneliti dengan key informan tersebut sosialisasi telah dilakukan dengan baik oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pendamping Program Keluarga Harapan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan kalau untuk Kabupaten disampaikan oleh Kepala Dinas melalui rapat koordinasi”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi sudah dilakukan dilingkungan masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2013 sampai saat ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB

mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dilaksanakan kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Sosialisasi Program Keluarga Harapam sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sejak pada tahun 2013 kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi sudah dilakukan dilingkungan masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pendamping Program Keluarga Harapan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk Kabupaten disampaikan oleh Kepala Dinas melalui rapat koordinasi”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan dengan sangat baik sejak pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, dilaksanakan kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pelaksanaan Sosialisasi PKH selalu dilakukan setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat PKH, yang mana didalam pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi agar masyarakat yang dikategorikan miskin yang terdaftar dalam keluarga penerima manfaat PKH ini bisa mengembangkan kemampuannya untuk membuka usaha agar tidak lagi terjerat dalam masalah kemiskinan dan bisa keluar dari program ini, serta agar masyarakat miskin lain yang tidak terdaftar juga bisa merasakan manfaat dari program ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pernah, saya pernah mengikuti pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan ini, sosialisasi dilaksanakan oleh pendamping Desa, pendamping desa memberi arahan dan mendampingi kepada peserta PKH di Desa Sukamaju ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pernah, dengan adanya sosialisasi Program keluarga Harapan ini di Desa Sukamaju sangat membantu Pemahaman warga Desa Sukamaju seperti saya yang penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pernah, saya pernah mengikuti sosialisasi ini, sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan barulah pendamping menyalurkan sosialisasi ini kepada warga yang ada di Desa Sukamaju”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi sudah dilakukan dilingkungan masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pernah mengikuti, pendamping Program Keluarga Harapan menyampaikan tentang bantuan PKH ini kepada masyarakat Keluarga penerima Manfaat di Desa Sukamaju”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember

2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Pernah, dengan adanya sosialisasi PKH di Desa Sukamaju sangat membantu pemahaman kepada warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan program keluarga harapan, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Tidak pernah, karna tidak terdata oleh Pemerintah setempat dan Pemerintah setempat tidak teliti dalam mendata”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan program keluarga harapan, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Tidak, kemungkinan besar pedulinya kurang sehingga saya tidak terdata dalam penerima bantuan Pogram Keluarga Harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan program keluarga harapan, menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Tidak, karena pemerintah setempat menganggap saya orang yang mampu, karna dari itu saya tidak dimasukkan data dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 November 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor

Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat diterima dilingkungan masyarakat, saya lihat masyarakat bahagia sekali mendengar adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini, walaupun masih ada masyarakat yang kecewa karna tidak mendapatkan bantuan”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Program Keluarga Harapan ini sangat diterima sekali oleh masyarakat, karena Program keluarga Harapan ini merupakan bantuan tunai, namun kendala-kendala pasti ada terutama bagi yang tidak menerima bantuan PKH”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bantuan ini tentu saja sangat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat, apalagi bantuan ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB

mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Diterima, karena sangat membantu dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat diterima, karena masyarakat sangat terbantu perekonomiannya dengan adanya bantuan PKH”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Diterima ini tidak perlu dipertanyakan lagi menurut saya, sudah jelas tentu saja masyarakat sangat terima dengan adanya bantuan ini, karna bisa membantu perekonomian keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Diterima dengan baik oleh masyarakat, karena memberikan keuntungan berupa uang yang bisa digunakan oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Ya tentu saja program ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat di Desa Sukamaju, karena dengan adanya bantuan tunai ini masyarakat bisa menggunakan uangnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bisa mengurangi masalah perekonomian di keluarganya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat diterima, karena dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini masyarakat Desa Sukamaju sangat terbantu, dengan bantuan yang diberikan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Diterima, karena saya sebagai masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini, sangat meringankan bagi kami yang perekonomiannya yang kurang berkecukupan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Aniemi Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Dapat diterima, saya sebagai masyarakat yang menerima bantuan PKH ini sangat senang sekali, karna bagi saya bantuan ini sangat saya butuhkan untuk membantu kehidupan hidup saya dan keluarga yang sangat kekurangan ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat bisa diterima dengan baik, karena dengan adanya bantuan PKH ini sangat membantu warga yang memang kekurangan dalam hal ekonomi”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak/Ibu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Diterima sekali, karena memberi keuntungan bagi saya yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan, uang yang diberikan bisa saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Jelas diterima, mana ada masyarakat yang menolak uang dari pemerintah, uangnya berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bantuan ini tentu saja sangat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat, apalagi bantuan ini sangat membantu perekonomian masyarakat miskin seperti saya ini, tetapi sayangnya saya tidak terdaftar kedalam bantuan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah Pelaksanaan program keluarga harapan dapat diterima dilingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Setahu saya pelaksanaanya sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Sukamaju. Kalau saya mendapatkan bantuan ini pasti senang sekali, soalnya uang ini membantu apalagi usia saya sekarang ini tidak bisa bekerja, mungkin belum rezeki”.

Dari pertanyaan informan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima dengan baik dilingkungan masyarakat. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang

telah dilakukan dengan key informan dan informan dapat disimpulkan mengenai indikator pemahaman program masyarakat terhadap bantuan program keluarga harapan adalah masyarakat cukup paham dengan bantuan ini, dan sosialisasi dilakukan diruang lingkup masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, dan juga program ini diterima sangat baik oleh masyarakat Desa Sukamaju karena membantu perekonomian keluarga yang tergolong miskin.

Peneliti melihat bahwa masyarakat tahu tentang program keluarga harapan (PKH) ini, rata-rata KPM mengerti secara rinci program ini dan tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang belum cukup mengerti, kemudian sosialisasi dilaksanakan dilingkungan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, masyarakat juga antusias dalam mengikuti sosialisasi ini karena membantu keluarga untuk menumbuhkan motivasi diri untuk lebih kreatif dalam meningkatkan perekonomian dengan salah satu caranya adalah berjualan. Karena pada dasarnya program ini ditunjukkan untuk meningkatkan perekonomian, memberikan pendidikan, dan juga agar kesehatan masyarakat yang tergolong miskin dapat terjaga. Namun sosialisasi ini tidak dilaksanakan di semua lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan dampak masyarakat miskin lainnya tidak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan, karena masyarakat hanya didaftarkan melalui data yang ada di Desa Sukamaju, sedangkan data yang ada di desa tersebut kurang lengkap, atau masih ada yang tidak terdaftar di Kecamatan. Kemudian jika dilihat dari sub indikator yang kedua yaitu apakah program ini dapat diterima dilingkungan masyarakat dapat dicermati bahwa program ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat karena membawa ke perubahan

yang lebih baik terhadap perekonomian, pendidikan, maupun keadaan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada Indikator Pemahaman Program, Menurut Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah sosialisasi program. beberapa masyarakat masih kurang mengerti tentang bantuan ini karena tidak terdaftar kedalam program atau terdaftar ke dalam program tetapi kurang menyerap informasi tentang program ini serta tidak aktif didalam sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi program hanya dilaksanakan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH saja dan dilakukan setiap bulan, dan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program ini tidak tahu cara mendaftarkan diri karena tidak pernah dilaksanakan sosialisasi kepada mereka, kemudian bantuan program keluarga harapan (PKH) ini dapat diterima oleh semua masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat di Desa Sukamaju ini Cukup Efektif karena sebagian masyarakat mengerti apa itu Program Keluarga Harapan dan sebagian masyarakat mulai mengikut pelaksanaan sosialisasi karna masyarakat ini menerima dengan adanya program ini, bagi mereka sangat membantu sekali bagi kehidupannya.

2. Tepat Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 November 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“menurut saya ada yang tepat sasaran dan tidak, tepat sasarnya ya yang mendapatkan bantuan memang masyarakat miskin, yang tidak tepat sasaran itu masyarakat yang tergolong mampu tapi dapat bantuan, data yang sudah terdaftar di dinas sosial mungkin tidak dicek satu persatu dilapangan mangkannya ada yang tidak tepat sasaran”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, walaupun banyak kendala-kendala dilapangan, dalam arti ada kendala tetapi bukan berarti tidak tepat sasaran bantuan ini disalurkan dari Kementrian Sosial”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai karena perubahan status ekonomi”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tepat sasaran, yang mendapatkan bantuan memang masyarakat yang miskin, dulu ada masyarakat mampu yang dapat bantuan tetapi sekarang sudah dikeluarkan dan ada yang mengundurkan diri”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, karena sumber data untuk penerima program keluarga harapan berasal dari DTKS yang diusulkan dari desa atau kelurahan”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tujuan program keluarga harapan ini untuk membantu masyarakat miskin dalam perekonomian kesehatan dan juga pendidikan, menurut saya hal ini sangat tepat sasaran karena masyarakat yang mendapat bantuan ini memang tergolong miskin, namun masih banyak juga sebenarnya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dikarenakan ada perubahan status ekonomi”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tepat sasaran, yang mendapatkan bantuan memang masyarakat yang miskin, dulu ada masyarakat mampu yang dapat bantuan tetapi sekarang sudah dikeluarkan dan ada yang mengundurkan diri. walaupun banyak kendala-kendala dilapangan, dalam arti ada kendala tetapi bukan berarti tidak tepat sasaran bantuan ini disalurkan dari Kementerian Sosial”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apakah bantuan yang diterima ini sudah tepat sasaran, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tepat, bantuan yang diberikan oleh dinas sosial kepada kami sudah tepat sasaran, bantuannya berupa uang tunai yang masuk dalam rekening”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah bantuan yang diterima ini sudah tepat sasaran, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah sangat tepat, saya menerima bantuan program keluarga harapan dari dinas sosial yang di usulkan dari pihak pemerintah desa dan namanya terdata di PKH ”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ani Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah bantuan yang diterima ini sudah tepat sasaran, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tujuan program keluarga harapan ini untuk membantu masyarakat miskin dalam perekonomian kesehatan dan juga pendidikan, menurut saya hal ini sangat tepat sasaran karena masyarakat yang mendapat bantuan ini memang tergolong miskin, namun masih banyak juga sebenarnya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apakah bantuan yang diterima ini sudah tepat sasaran, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tepat sasaran, saya merasa berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini karna saya merasa kurang mampu untuk kehidupan hidup sehari-hari”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember

2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah bantuan yang diterima ini sudah tepat sasaran, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“sudah sangat tepat menurut saya, karena saya tergolong ke warga yang berhak menerima kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“kurang tepat sasaran menurut saya, saya melihat masyarakat yang dapat bantuan itu ada yang sudah mampu, rumahnya besar, perhiasan emasnya juga banyak, dan punya kendaraan lebih dari satu”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tidak tepat sasaran, yang dapat banyak yang sudah mampu, yang parahnya yang punya mobil juga dapat bantuan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah Masyarakat yang menerima bantuan PKH sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam tujuan program, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Belum tepat sasaran, masih banyak yang belum dapat saya contohnya, tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, saya janda yang ditinggal suami selama 17 tahun juga tidak dapat bantuan ini, tetapi dari segi syarat sebenarnya sudah memenuhi untuk dapat bantuan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 November 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat mengedepankan, bantuan ini memberikan bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat PKH, nah bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan dari berbagai keluarga, jika dikeluarganya ada anak usia sekolah maka bantuan itu digunakan untuk pendidikan anak tersebut, contohnya untuk membeli seragam, alat tulis, buku sekolah dan hal lain yang dibutuhkan. Kemudian jika dikeluarganya ada ibu hamil dan balita maka uang tersebut digunakan untuk membantu kesehatannya seperti membeli susu, vitamin dan lainnya. Dan apabila keluarganya ada lansia maupun disabilitas maka uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hariannya karena sudah tidak mampu bekerja lagi”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat memprioritaskan, karena program keluarga harapan ini mempunyai tiga komponen atau dikategorikan yaitu ibu hamil, anak usia dini, dan disabilitas. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat prioritas utama untuk merubah mindset masyarakat dilapangan untuk anak-anak keluarga penerima manfaat PKH”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul

10:30 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat mengedepankan, karena bantuan yang diberikan ini berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Mengedepankan, karena bantuan yang diterima ini bisa digunakan untuk keperluan hidupnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Iya, karena bantuan program keluarga harapan berupa uang tunai yang bisa dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesos”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah program ini

mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Program Keluarga Harapan ini Menurut saya memang mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat miskin, contohnya dikasih uang, kemudian kesehatan dan pendidikan juga diperhatikan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“sesuai yang dibutuhkan masyarakat sekali, yang tidak sekolah karena tidak punya biaya membeli seragam jadi bisa sekolah. Periksa kesehatan dan minta obat ke puskesmas juga tidak bayar jadinya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya Kegiatan dalam program ini sangat bagus sekali, dikarenakan kalau terdaftar dalam program ini dan di dalam keluarga terdapat anak sekolah maka orang tua wajib menyekolahkan anaknya, jika ada ibu hamil, balita maupun disabilitas dan lanjut usia maka wajib memeriksakan kesehatannya, jadi nggak ada lagi itu anak yang tidak sekolah dan anggota keluarga yang sakit-sakitan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Berhak sekali, kami dari keluarga yang tidak berkecukupan ini merasa berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Berhak, karena saya dari keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak saya, dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini saya bisa menyekolahkan anak saya seperti orang tua yang lainnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“sangat berhak, karena perekonomian kami sangat rendah hanya cukup untuk makan sehari-hari, dengan adanya bantuan PKH ini saya dan keluarga merasa ringan dan sangat membantu sekali”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“menurut saya berhak, karena dari segi ekonomi memang tidak terlalu bisa mencukupi kehidupan sehari-hari”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“berhak, karena kalau dari segi syarat sudah memenuhi untuk mendapat bantuan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Iya, banyak yang ingin dapat bantuan program keluarga harapan ini karena memang sangat berguna dan banyak sekali manfaatnya di lingkungan masyarakat”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya, sangat-sangat membutuhkan program ini karena sangat membantu yang tidak mampu seperti saya ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan

ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sesuai yang dibutuhkan masyarakat sekali, yang tidak sekolah karena tidak punya biaya membeli seragam jadi bisa sekolah, periksa kesehatan dan minta obat ke puskesmas juga tidak membayar”.

Dari pertanyaan informan, Program Keluarga Harapan memberikan keuntungan yang sangat banyak dalam lingkungan masyarakat. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator Tepat Sasarannya program ini, program ini dibuat agar diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang memenuhi indikator kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial dengan adanya data masyarakat miskin yang didapatkan dari Desa Sukamaju maka masyarakat miskin bisa terdaftar kedalam program keluarga harapan ini, walaupun masih banyak sekali yang belum terdaftar dikarenakan kuota untuk mendapatkan bantuan ini tidak layak, dan bantuan ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana membantu agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dalam segi pendidikan maupun kesehatan.

yang peneliti lakukan di Desa Sukamaju, peneliti melihat dari indikator tepat sasaran atau tidak program ini dilingkungan masyarakat dapat dilihat bahwa yang menerima bantuan program keluarga harapan di Desa Sukamaju kurang tepat sasaran karena banyak masyarakat yang terbilang mampu mendapatkan bantuan ini, dan juga masih banyak sekali masyarakat yang terbilang mampu mendapatkan bantuan ini, dan juga masih banyak sekali masyarakat yang benar-benar miskin yang tidak mendapatkan bantuan, namun pemerintah sudah

melakukan tugasnya dengan baik karena mendapatkan data dari Desa yang mana Desa lah yang paling mengerti dengan kondisi masyarakatnya, dan bantuan yang diberikan ini sangat membantu perekonomian kesehatan serta pendidikan masyarakat di Desa Sukamaju.

Berdasarkan hasil penelitian Menurut Budiani Dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. pihak dimana Dinas Sosial telah melaksanakan tugas dengan baik, karena menetapkan sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh Desa, namun dilapangan saat ini masih ada yang tidak tepat sasaran, yang mana jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Sukamaju berjumlah 2000 KK sedangkan yang mendapatkan bantuan hanya 128 KK, seharusnya pihak Dinas Sosial turun kelapangan dan meninjau keluarga penerima manfaat dengan teliti.

Analisis peneliti, yang peneliti lihat di Desa Sukamaju ini Kurang Efektif. Dikarenakan masih ada masyarakat yang menerima bantuan ini tetapi mereka tidak layak menerimanya. Masih banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan kelalaian dari pihak yang mendata Program Keluarga Harapan ini.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang

tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kegiatan yang dilaksanakan dalam program keluarga harapan itu dilaksanakan oleh pendamping PKH yang ada disetiap desa ataupun kelurahan, menurut saya pendamping sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang seharusnya, Baik itu pelaksanaan sosialisasi maupun yang lainnya, karena saya di Kabupaten saya kurang tahu secara lengkap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pendamping PKH, tetapi menurut saya sudah sangat baik”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, karna bantuan ini langsung dilaksanakan kementrian sosial, SDM hanya melakukan monitoring dan evaluasi. Bantuan PKH ini disalurkan sebanyak empat kali dalam satu tahun, untuk waktu ditentukan oleh Kemensos dalam arti tiga bulan sekali”.

Dari pernyataan informan,. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan

program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, karena sudah ada agendanya dan dilaksanakan setiap sebulan sekali”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena bantuan ini disalurkan setiap sebulan sekali dan empat kali dalam satu tahun oleh kementerian sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai, karena sudah ada agenda pertemuan kelompok yang dilaksanakan sebulan sekali oleh kemsos”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan

oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah sesuai, Kegiatan yang dilaksanakan dalam program keluarga harapan itu dilaksanakan oleh pendamping PKH yang ada disetiap desa maupun kelurahan, menurut saya pendamping sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang seharusnya, Baik itu pelaksanaan sosialisasi maupun yang lainnya ”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat sesuai sekali, karena bantuan langsung ini dilaksakan oleh kementerian sosial dan di laksanakan sebulan sekali dan disalurkan empat kali dalam setahun”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan program keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya sebagai pendamping program keluarga harapan di Desa Sukamaju selalu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, baik itu tentang waktu pelaksanaan sosialisasi maupun tentang waktu pencairan dana program keluarga harapan ini, biasanya saya sampaikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memang aktif didalam kegiatan dengan cara pergi langsung kerumahnya atau di informasikan melalui telepon atau whatsapp, kemudian keluarga inilah yang akan menyebarkan informasi ini kepada keluarga lain”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tepat sekali, saya menerima bantuan ini empat kali dalam setahun, bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang langsung masuk direkening saya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tepat pada waktunya, saya menerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, penyalurannya empat kali dalam setahun”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pemerintah Desa memberikan informasi kepada kami penerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, dan bantuan yang diberikan sesuai pada waktu yang ditentukan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan program

keluarga harapan ini tepat pada waktunya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya bantuan yang disalurkan ini kadang tepat waktu kadang tidak tepat pada waktunya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan program keluarga harapan ini tepat pada waktunya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tepat pada waktunya, pendamping program keluarga harapan biasanya menyampaikan informasi lewat salah satu KPM, kemudian disebarluaskan, saya juga ikut menyebarkan informasi juga kepada KPM lain, kerja pengurus PKH sudah sangat baik menurut saya orangnya juga ramah ”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Biasanya sesuai kadang telat juga, kenapa terlambat saya juga tidak tau alasannya karna saya tidak menerima bantuan PKH ini, yang saya lihat kemarin ada selama enam bulan uang PKH disalurkan perbulan terus bulan selanjutnya disalurkan per tiga bulan sekali”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh

pengurus bantuan keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Iya, karena penyaluran bantuan ini dilakukan dalam empat kali dalam satu tahun kepada keluarga penerima program keluarga harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus bantuan keluarga harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kurang tau juga ya, karena saya tidak dapat bantuan PKH ini, tetapi yang saya lihat penyalurannya sepertinya sesuai dengan waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Jadwal pencairan dana PKH ini akan dilakukan per tiga bulan, besarnya itu sesuai dengan ketetapan, menurut saya sudah tepat waktu, namun kadang dibilang terlambat oleh masyarakat karena masyarakat kurang menyerap informasi dengan baik, yang seharusnya jadwal pencairannya hari rabu tapi mereka mengira pencairannya hari selasa, biasanya keterlambatan itu juga disebabkan oleh uang dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM dan juga kadang karena sistem eror”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program

keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sudah sesuai dengan waktunya, tidak ada keterlambatan sama sekali dari dinas sosial sudah mencairkan dana sesuai dengan waktu yang seharusnya, tidak ada kendala kecuali kartunya rusak”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah sesuai, karena penyaluran bantuan sosial ini disalurkan empat kali dalam satu tahun oleh kementerian sosial republik indonesia”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sudah sesuai, tidak ada kendala apapun jika adapun itu dikarnakan kartunya yang rusak tidak bisa digunakan untuk mencairkan uang”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat sesuai, karena penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah ditetapkan sebanyak empat kali dalam setahun oleh kementerian sosial RI”.

Dari pernyataan informan Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, bantuannya langsung masuk ke rekening peserta yang menerima program keluarga harapan ”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sesuai, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan empat kali dalam satu tahun”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tepat waktu, tidak ada keterlambatan sama sekali dari dinas sosial sudah mencairkan dana sesuai dengan waktu yang seharusnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apa saja jenis bantuan yang diberikannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Jenis bantuan yang diberikan berupa uang tunai berdasarkan bidang komponen yang saya miliki”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apa saja jenis bantuan yang diberikannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bantuan yang saya terima bantuan uang tunai, komponen bidang pendidikan, uang yang diberikan untuk biaya anak sekolah ditingkat SD”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apa saja jenis bantuan yang diberikannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bantuan yang saya terima adalah berupa uang tunai, uang yang diberikan untuk membeli keperluan kebutuhan hidup”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apa saja jenis bantuan yang diberikannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bantuan Uang Tunai, komponen bidang pendidikan, uang yang diberikan untuk biaya anak sekolah ditingkat SD”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apa saja jenis bantuan yang diberikannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Jenis bantuan yang saya terima adalah uang tunai, uang ini saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat baik, karena penyalurannya tepat waktu dan sangat membantu kepada keluarga yang tidak mampu”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Memang sangat baik sekali, bisa membantu warga yang kurang mampu, tetapi sayangnya saya tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat baik, karena membantu masyarakat yang kurang mampu”.

Dari pertanyaan informan pencairan dana program keluarga harapan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator Tepat Waktu, yaitu pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik tentang waktu pencairan dana PKH maupun tentang waktu pelaksanaan sosialisasi yang akan diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat, sedangkan untuk jadwal pencairan dana PKH itu sudah tepat waktu, namun terlambat dikarenakan kurangnya pemahaman informasi di lingkungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sukamaju, peneliti melihat dari indikator Tepat Waktu, pendamping melakukan tugasnya dengan baik, menyampaikan informasi langsung kepada salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan juga melaksanakan sosialisasi rutin setiap bulan agar membantu KPM meningkatkan taraf kualitas hidupnya. dan tentang Apakah pencairan dana PKH terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dilihat bahwa jadwal pencairan dana dilakukan pertiga bulan, namun pada tahun 2021 dikarenakan adanya covid-19 dana PKH pada bulan januari sampai dengan juni disalurkan setiap bulan agar membantu perekonomian keluarga yang terkena dampak covid-19 ini, baik keluarga yang berhenti bekerja atau pun keluarga yang bekerja namun gajinya tidak penuh atau dipotong karena dampak covid-19. Kemudian mengenai alasan keterlambatan pencairan dan PKH ini disebabkan oleh kesalahan sistem dana uang yang diberikan pemerintah pusat

belum masuk ke rekening KPM serta kurangnya pemahaman informasi dari Keluarga Menerima Manfaat (KPM) karena informasi tidak disampaikan secara langsung dan hanya dari mulut ke mulut, sehingga menyebabkan informasi yang salah, dan juga keterlambatan dikarenakan oleh KPM yang terlambat mengambil uangnya dikarenakan sibuk atau tidak berada di rumah pada saat pencairan dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator Tepat waktu, Menurut Budiani Dalam Urika Tri Astari (2018), Katepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting dalam program PKH. pihak pengurus Program Keluarga Harapan sudah melakukan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan pencairan dana PKH terkadang belum terealisasikan tepat waktu yang mana seharusnya dicairkan pada bulan april namun baru bisa dicairkan bulan mei dikarenakan uang yang diberikan pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM dan juga karena kesalahan sistem. Kemudian informasi kurang diterima dengan baik oleh KPM dikarenakan hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, yang seharusnya cara yang efektif adalah menyampaikan langsung informasi kepada masing-masing KPM melalui grub whatsapp, yang tidak akan menyebabkan adanya informasi yang salah.

Analisis peneliti, hasilnya Cukup Efektif. Informasi yang diberikan sampai kepada peserta penerima KPM tetapi sebaiknya informasi ini lebih baik

disampaikan langsung melalui grub WA agar informasinya lebih valid, bantuan yang disalurkan sampai kepada si penerima walaupun terkadang ada keterlambatan dalam menerimanya disebabkan dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM dan juga karena kesalahan sistem.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan bagaimana cara agar program yang telah dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Caranya ada sangsi yang diberikan, jika anak keluarga penerima manfaat tidak sekolah, sehingga keluarga penerima manfaat mau tidak mau diberi sangsi jika tidak sekolah”.

Dari wawancara peneliti dengan key informan tersebut sosialisasi telah dilakukan dengan baik oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kelebihan program keluarga harapan sejak dari awal terbit bagi penerima program keluarga harapan anaknya wajib sekolah, jika anaknya tidak sekolah bantuannya akan ditangguhkan atau di stop”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Melalui program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat diberikan bantuan sosial kepada anak SD, SMP, SMA agar anak bisa tetap sekolah”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Caranya, bantuan uang tunai ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat, agar anak yang tidak bisa sekolah bisa tetap sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Melalui program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat diberikan bantuan uang tunai kepada anak SD, SMP, SMA agar mereka tetap sekolah dan tidak putus sekolah”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Dengan cara, menyekolahkan anaknya dengan uang yang sudah diberikan jika anaknya tak mau sekolah mau tidak mau bantuan ini akan ditarik balik atau distop oleh dinas sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Caranya bantuan uang tunai ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat, agar anak yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah seperti teman-temannya yang lainnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Bagaimana cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Caranya melalui program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat diberikan bantuan sosial kepada anak SD, SMP, SMA agar anak bisa tetap sekolah, Penerima program keluarga harapan anaknya wajib sekolah, jika anaknya tidak sekolah bantuannya akan ditangguhkan atau di stop”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember

2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peserta PKH ini, Apakah bisa membantu meringankan masalah perekonomian, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat membantu, kami dari keluarga yang kurang mampu ini merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan, masalah perekonomian kami jadi ringan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peserta PKH ini, Apakah bisa membantu meringankan masalah perekonomian, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sangat bisa sekali, karena dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan ini saya sebagai masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan ini merasa sangat terbantu sekali”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peserta PKH ini, Apakah bisa membantu meringankan masalah perekonomian, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bisa, sangat-sangat membantu bagi kami masyarakat yang memiliki masalah dalam perekonomian ini, kami merasa ringan dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Dengan adanya pelayanan pendidikan dan

kesehatan untuk peserta PKH ini, Apakah bisa membantu meringankan masalah perekonomian, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat terbantu sekali, karena dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan ini saya sebagai masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan ini merasa sangat terbantu sekali”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Dengan adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peserta PKH ini, Apakah bisa membantu meringankan masalah perekonomian, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat membantu bagi saya dan sangat meringankan masalah perekonomian di keluarga saya, saya bisa berobat secara gratis ke puskesmas terdekat dan bisa mengambil obat secara gratis”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tidak, karena pendataannya kurang teliti, banyak yang tertinggal pendataan yang selayaknya di data, seperti saya tidak terdata di penerimaan PKH”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tujuannya sangat tercapai, hanya saja di Desa Sukamaju ini masih ada yang kurang teliti dalam pendataan masih ada yg tertinggal dan kurang peduli terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Iya tercapai, tapi masih ada yang tidak tepat sasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum’at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, namun untuk tahun 2022 ada sedikit perubahan kebijakan, sehingga terkesan tidak tercapai”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, sangat berpengaruh karena jika tidak sekolah akan distop bantuannya, sangat mempengaruhi tingkat pendidikan kesehatannya”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tercapai, karna dengan adanya program keluarga harapan banyak anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang awalnya putus sekolah bisa kembali bersekolah lagi”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, karna dengan adanya program keluarga harapan ini anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang awalnya tidak sekolah dapat sekolah seperti yang lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah, karna dengan adanya program keluarga harapan banyak anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang awalnya putus sekolah, dapat kembali bersekolah, balita yang tidak dibawa ke faskes jadi rajin dibawa ke fakes”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25

November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, sangat berpengaruh karena jika anak peserta penerima manfaat program keluarga harapan tidak sekolah akan di stop bantuannya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tercapai, karena dengan adanya program keluarga harapan ini banyak anak dari peserta keluarga penerima manfaat yang awalnya tidak sekolah, dapat sekolah seperti teman-teman yang lain”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai tujuannya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tentu saja sudah, karna dengan adanya program keluarga harapan banyak anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang awalnya putus sekolah bisa kembali bersekolah lagi”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan di Desa

Sukamaju sudah tercapai tujuan PKH nya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, bantuan yang diberikan kepada saya yang berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan di Desa Sukamaju sudah tercapai tujuan PKH nya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tercapai, bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diberikan dan tercapai tujuannya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Aniem Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan di Desa Sukamaju sudah tercapai tujuan PKH nya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, bantuan yang diberikan oleh dinas sosial sudah tersalurkan kepada masyarakat desa sukamaju dan sudah tepat sasarannya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan Ibuk Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan di Desa Sukamaju sudah tercapai tujuan PKH nya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sudah tercapai, tetapi masih banyak yang seharusnya menerima program keluarga harapan tetapi tidak mendapatkan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Apakah program keluarga harapan di Desa Sukamaju sudah tercapai tujuan PKH nya, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tercapai, bantuan yang saya terima sudah sesuai dengan tujuannya, bantuan yang saya terima berupa uang tunai”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah ada pengawasan dari dinas terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dari program dapat tercapai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya tidak tahu, karena saya tidak menerima bantuan program keluarga harapan ini”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah ada pengawasan dari dinas terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dari program dapat tercapai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk hal ini saya kurang tau, soalnya saya tidak dapat bantuan, ada yang survey ke lapangan tapi saya tidak tau itu dari dinas sosial atau dari dinas yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah ada pengawasan dari dinas terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dari program dapat tercapai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Setahu saya dari orang-orang yang menerima bantuan program keluarga harapan ini, ada pengawasan tetapi jarang sekali langsung turun kelapangan, mungkin hanya sampai ke pendamping PKH saja, kalau langsung memeriksa ke KPM hanya sesekali”.

Dari pertanyaan informan, cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH, jadi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Key informan dan Informan dapat dilihat dari indikator Tercapainya Tujuan dari program keluarga harapan, yaitu cara meningkatkan taraf pendidikan untuk peserta PKH ini dengan cara peserta KPM harus menyekolahkan anaknya jika anak nya tidak mau maka akan diberi sanksi atau bantuan ini akan distop oleh pihak Dinas Sosial, pihak Dinas sosial juga melakukan pengawasan terhadap program ini, yang mana pengawasannya dengan cara turun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sukamaju, peneliti melihat dari indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis dapat dilihat tujuan dari dibentuknya program keluarga harapan sudah tercapai walaupun tidak seluruhnya tercapai, yang mana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, juga agar

masyarakat dengan mudah mendapatkan akses dibidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia, juga agar penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat mempertahankan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI, dengan adanya bantuan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera, karena dapat menggunakan uang dari bantuan ini untuk memenuhi kebutuhannya atau membangun usaha agar bisa keluar dari garis kemiskinan, dan juga dengan terdaptarnya masyarakat dalam program ini juga membantu untuk mendapatkan bantuan komplementer lainnya. Namun sayangnya peneliti juga melihat bahwa uang yang diberikan bantuan ini tidak digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti membeli beras ataupun peralatan sekolah anaknya tetapi digunakan untuk membeli baju, ataupun hal yang tidak terlalu perlu. Kemudian mengenai Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH ini sudah tercapai, peneliti melihat bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan ini sudah tercapai namun di setiap tahunnya pasti akan ada perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator Tercapainya Tujuan, Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dana target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini disampaikan diteori yang dikemukakan oleh Budiani dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. bahwa tujuan program keluarga harapan untuk meningkatkan pendidikan serta memelihara kesehatan sudah sangat tercapai namun masih ada

masyarakat yang menggunakan uang ini untuk hal yang bersifat tidak kebutuhannya, dan juga masih banyak masyarakat miskin lainnya yang belum terdaftar kedalam program ini, dari pihak Dinas Sosial seharusnya lebih sering melakukan pengawasan agar masyarakat bisa menyampaikan langsung keluhan kesahnya atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan bisa mendapatkan titik terang ataupun solusi dari pihak Dinas Sosial tersebut.

Analisis Peneliti, berdasarkan hasil yang peneliti lihat di Desa Sukamaju ini Kurang Efektif. Dikarenakan masih ada masyarakat yang menyalahgunakan uang, yang seharusnya tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh peserta PKH agar anggota RTSM ini kesehatannya bisa terjaga dan pendidikan anaknya bisa meningkat agar tidak terjadi pengangguran. Tapi malah sebaliknya keperluan anaknya sekolah tetapi dipergunakan untuk yang lainnya. Dari pihak pendampingnya harus lebih sering turun mengawasi pihak masyarakat Desa Sukamaju ini.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan sejauh mana kegiatan dapat memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat, dan bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai,

Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Semenjak adanya program keluarga harapan di Kabupaten Bengkalis masalah kemiskinan yang terjadi sudah lumayan teratasi, dan juga bisa dilihat jumlah peserta PKH ini setiap tahunnya juga meningkat yang menandakan bahwa semakin banyak masyarakat miskin yang terdaftar walaupun belum semuanya”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat berpengaruh sekali, sudah banyak masyarakat miskin jadi sejahtera dan angka kemiskinan juga jadi menurun karena program keluarga harapan ini”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bisa, karena program keluarga harapan mempengaruhi keluarga penerima manfaat untuk selalu aktif dalam bidang pendidikan walaupun dalam jangka waktu yang sangat panjang”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB

mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sesuai dengan slogan program keluarga harapan memutuskan rantai kemiskinan namun dalam artian secara cepat tidak, karena tujuan program keluarga harapan ini dalam jangka panjang, mangkannya anak-anak keluarga penerima manfaat PKH harus sekolah. Karena kalau tidak menuntaskan sekolahnya akan menimbulkan kemiskinan baru”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Dapat, karena sudah banyak keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang sudah bisa keluar secara mandiri/graduasi mandiri”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bisa, karena program keluarga harapan mempengaruhi keluarga penerima manfaat untuk selalu bisa aktif dibidang pendidikan atau bidang lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB

mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Dapat mengatasi kemiskinan, karna sudah ada peserta keluarga penerima manfaat yang sudah bisa keluar secara mandiri”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dikabupaten bengkalis, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat bisa, karna program keluarga harapan mempengaruhi keluarga penerima manfaat untuk selalu aktif dibidang pendidikan walaupun dalam jangka waktu yang panjang”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana PKH di desa sukamaju ini, Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bisa, dengan adanya bantuan ini anak yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Walaupun tidak semua bisa terpenuhi setidaknya bisa mengurangi angka kemiskinan dengan tidak menjadi pengangguran”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana PKH di desa sukamaju ini, Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Bisa sekali, karna dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini anak yang tidak bisa sekolah karna kekurangan biaya untuk masuk sekolah, itu adalah salah satu menurunkan angka kemiskinan dan dengan adanya bantuan ini bisa sedikit mengurangi angka pengangguran yang ada di desa sukamaju”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Aniemi Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana PKH di desa sukamaju ini, Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat bisa, walaupun setiap tahunnya bertambah angka kemiskinannya setidaknya mengurangi angka pengangguran dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini anak yang tidak sekolah jadi bisa sekolah”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana PKH di desa sukamaju ini, Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat kecil, kemungkinan untuk menurunkan angka kemiskinan karna setiap tahunnya semakin bertambah angka orang yang miskin”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana PKH di desa sukamaju ini, Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Semenjak ada program keluarga harapan ekonomi saya sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya, karena uang yang didapat saya gunakan untuk modal berjualan di SD”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kemiskinan teratasi, yang biasanya tidak dapat bantuan sekarang sudah dapat karena masuk dalam data baru”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Yang saya lihat tidak, tiap tahun penerimanya bantuan program keluarga harapan bertambah, tandanya kan masyarakat miskin tambah banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Apakah tujuan program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan di desa sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Karena masih banyak yang belum dapat bantuan, kurang dapat mengatasi masalah kemiskinan menurut saya, contohnya saja anak saya sudah dua tapi belum pernah dapat bantuan apapun”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Dra. Hj Martini, MH pada hari jum'at 25 november 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Sosial beliau selaku Kadis Sosial PKH di Kabupaten Bengkalis mengenai,

Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Program keluarga harapan sendiri sangat memberikan keuntungan kepada keluarga miskin caranya dengan diberikan akses pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap program sosial lainnya yang merupakan program komplementer. Keluarga yang mendapatkan bantuan PKH itu juga harus mendapatkan subsidi BNPT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE, dan lain-lain, yang diibaratkan PKH ini adalah tulang punggung penanggulangan kemiskinan”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, SE, SY selaku KASI Jamsos di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Caranya dengan memberikan bantuan sesuai kategori yang dimiliki, misal semakin banyak anak sekolah semakin besar nominal yang diterima”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Martias, Sp selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Caranya dengan memberikan bantuan program keluarga harapan ini dengan sesuai kategori yang dimiliki oleh peserta keluarga penerima manfaat PKH”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri Hamzah, SE, M.Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 11:00 WIB

mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Saya lihat cara program keluarga harapan memberikan keuntungan kepada masyarakat ya dengan memberikan uang, uangnya bebas digunakan untuk apa saja menurut saya”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Maiyusra, SN, S.Sos Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:00 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Caranya, dengan memberikan bantuan ini masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya pembinaan yang diberikan dari pendamping program keluarga harapan”.

Dari pernyataan informan, Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syahendra, A.Md Si selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 14:30 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Keuntungannya adalah masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat PKH sangat terbantu dengan adanya bimbingan/pembelajaran yang didapatkan dari pendamping program keluarga harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Susi Susanti, SE selaku Pegawai Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada hari Jum’at 25 November 2022 Pukul 15:00 WIB

mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Caranya dengan memberikan bantuan ini sesuai dengan kategori yang dimiliki”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Solihin, SE selaku Pendamping PKH Di Desa Sukamaju pada hari Rabu 30 November 2022 Pukul 14:10 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Keuntungannya masyarakat bisa dapat akses kesehatan dan pendidikan, bisa membuka usaha juga, bisa buka usaha karna bantuan bahan pangan juga dapat kalau terdaftar program keluarga harapan jadi uang PKH bisa digunakan untuk berjualan atau berkebun”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Saliah Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana program keluarga harapan, apa yang dirasakan apa ada perubahan, apakah kebutuhan ekonomi terbantu, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Selama berjalannya bantuan program keluarga harapan ini masyarakat sukamaju merasa ringan karna terbantu dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini kebutuhan ekonomi kami bisa terpenuhi walaupun tidak terpenuhi semua setidaknya sangat terbantu sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Senin 12 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana program keluarga harapan, apa yang dirasakan apa ada perubahan, apakah kebutuhan ekonomi terbantu, hasil wawancarnya adalah sebagai berikut :

“Yang dirasakan ya sangat senang sekali, karna dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini saya sebagai masyarakat yang kurang mampu ini merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Aniemi Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 11:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana program keluarga harapan, apa yang dirasakan apa ada perubahan, apakah kebutuhan ekonomi terbantu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Ya pasti saya sangat senang sekali dengan adanya bantuan PKH ini, sangat membantu sekali, uang yang didapat saya gunakan untuk keperluan kebutuhan hidup keluarga saya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tuti Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 13:30 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana program keluarga harapan, apa yang dirasakan apa ada perubahan, apakah kebutuhan ekonomi terbantu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sangat membantu sekali, terutama dalam hal ekonomi keluarga kami, kami bisa menggunakan uang nya untuk membeli apa yang kami butuhkan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kateno Selaku Peserta Penerima PKH Di Desa Sukamaju pada hari Selasa 13 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB mengenai, Selama berjalannya bantuan dana program keluarga harapan, apa yang dirasakan apa ada perubahan, apakah kebutuhan ekonomi terbantu, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Ada perubahan, kami merasa terbantu perekonomiannya, dan kami juga merasa program keluarga harapan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti kami ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Katijem selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya lihat cara program keluarga harapan memberikan keuntungan kepada masyarakat ya dengan memberikan uang, uangnya bebas digunakan untuk apa saja menurut saya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jumin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 13:20 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kalau ditanya keuntungan yang didapat sangat banyak sekali, seperti dapat uang per tiga bulan yang bisa digunakan untuk berjualan, beternak atau bertani”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tugiatin selaku orang miskin yang tidak menerima PKH pada hari Sabtu 17 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB mengenai, Bagaimana cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Sukamaju, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Keuntungannya, ekonominya dapat terbantu karena ekonominya pas-pasan mangkannya sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat didesa sukamaju”.

Dari pertanyaan informan, Program Keluarga Harapan membantu dalam mendapatkan bantuan lainnya. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

key informan dan informan dapat dilihat dari indikator Perubahan Nyata yang terjadi dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan, yaitu kehidupan masyarakat menjadi sejahtera setelah mendapat bantuan ini dan akses pelayanan kesehatan menjadi mudah, serta akses pelayanan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sukamaju, peneliti melihat dari indikator Perubahan Nyata terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis dapat dilihat bahwa program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi namun tidak sepenuhnya, serta program keluarga harapan sendiri merupakan tulang punggung dari penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nasional. Apabila terdaftar dalam program ini maka juga harus dipastikan bahwa mendapatkan bantuan komplementer seperti subsidi BNPT, Jaminan Sosial KIS, KIP, Bantuan Rutilahu, Pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada indikator Perubahan Nyata, Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Danin dalam Urika Tri Astari (2018), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi. Program Keluarga Harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di

Desa Sukamaju, namun kendalannya masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar kedalam program ini dan juga program ini menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan sehingga masyarakat tidak ingin keluar dari rantai kemiskinan, kemudian keuntungan yang didapat dari program ini sangatlah banyak, seperti dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta juga mendapat bantuan komplementer.

Analisis si peneliti, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lihat Cukup Efektif, karena dengan adanya bantuan PKH ini masyarakat di Desa Sukamaju kehidupannya lebih sejahtera, yang tadinya anaknya tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah dengan adanya bantuan ini. Walaupun tidak semua masyarakat yang kurang mampu dibantu tetapi setidaknya bisa mengurangi angka kemiskinan di Desa Sukamaju.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH di Desa Sukamaju Cukup Efektif, dikarenakan masih terdapat kesalahan pendataan peserta PKH yang tidak memenuhi kriteria, kemudian penyalahgunaan dana dari peserta PKH diluar dari bidang yang ditentukan serta belum terpenuhi Fasilitas Lembaga Keuangan seperti BRI Link untuk pencairan dana. Agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai, perlu adanya kerja sama yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dengan para peserta penerima dana PKH serta pengawasan dari semua pihak. Perlu kesadaran bagi masyarakat peserta PKH dalam menggunakan dana yang diterima.

6.2 SARAN

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepada pihak pemerintah Desa Sukamaju dan Dinas Sosial agar dapat lebih teliti didalam menetapkan sasaran penerima Program Keluarga Harapan agar tujuan pelaksanaan program ini dapat tercapai. Dalam pengambilan data yang dilakukan oleh pihak Desa seharusnya berkoordinasi dengan pihak RT RW agar tidak terjadi kesalahan atau ketidak tepatan sasaran dalam pengambilan data.
- b. Sebaiknya pihak Dinas Sosial menambah jumlah pendamping Program Keluarga Harapan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Diharapkan kepada Pendamping PKH agar dapat menggunakan media komunikasi yang lebih efektif kepada keluarga penerima manfaat agar tidak terjadinya penyampaian informasi yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Bandung : Alfabeta.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Halim, M. Syam Kusufi. 2014. *Organisasi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Azam, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Astari, Urika Tri. 2018. *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Pandek Bantul*. Karangmalang Yogyakarta.
- Astari, Urika Tri & Argo Pambudi. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul*.
- Bryant, Coralie & Louise G. White. 1989. *Development Management For Developing Countries*. Rusyanto L. Simatupang translation. Jakarta : LP3ES.
- Direktorat Jaminan Sosial. (2013). *Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Ed Revisi.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fayol, Hendri, Sufian & Indra. 2016. *Prinsip dan Unsur Manajemen*.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Herdiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Hicks, Herbert and G. Ray Gullet. 1987. *Organization Theory and Behavior*. Translation of G. Kartasapoetra. Jakarta : Literacy Development.
- Hamim, Sufian. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.

- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi Negara*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau. Uir Press.
- Hamim, Sufian. 2005. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.
- Ismail, W William. 2007. *Implementasi pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indrastuti, S. 2021. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Edisi Revisi. Penerbit UR Press Pekanbaru.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Laili & Misfi Rohani. 2014. *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat*.
- Muchlis, Indra A. & Sufian Hamim. 2013. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.
- Muchlis, Indra A. & Sufian Hamim. 2012. *Administrasi Dan Manajemen Pembangunan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Trussmedia Grafika.
- Muchlis, Indra A. & Sufian Hamim. 2016. *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Trussmedia Grafika.
- Makmur. 2008. *Keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan*.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refliks Aditama.
- Mahmudi. 2010. *Efektivitas Organisasi*. Edisi Kedua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nurman & Andriyus. 2014. *Permasalahan Penduduk Indonesia*. Hak Cipta Marpoyan Tujuh Publishing.
- Richad, M. Steers & Waluyo. 2007. *Efektivitas Kebijakan*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Rosmiati, dkk. "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II", KEMINFO RI, 2011.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Mengentaskan Kemiskinan*. Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Siagian, Sondang. P. & Matias. 2012. *Kemiskinan dan Solusi*. Medan : PT. Grasindo Monoratama.
- Soerjono, Soekanto & Budi Sulistyowati. 2014. *Pemecahan Masalah Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyani. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat*. Bandung : PT Refikia Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program keluarga Harapan Ditinjau Dari Perseptif".
- Taylor, Sufian & Indra. 2016. *prinsip-prinsip dasar manajemen yang mendasari pendekatan ilmiah terhadap manajemen*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan studi kasus : Edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta : CAPS.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. Peraturan Perundangan.
- Wrihatnolo & Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputido.

Jurnal :

- Arieyanti Syamputri, Sonny Hersona GW, Hartelina Enrichment. 2022. The Influence of Compensation on the Performance of Program Keluarga Harapan (Pkh) at The Karawang District Social Services. *Journal of Management* Vol. 2 No. 2. 2022 e-ISSN 2721-7787. www.enrichment.iocspublisher.org

- Ade Nur Istiani, M. Mansyur. 2022. Analysis of Communication Media Assistance On The Program Keluarga Harapan (PKH) In The Implementation of Family Development Session (FDS)”. *KOMUNIKA*. Vol No. I (2022) : 2615-5206. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>
- Aras Solong, Dzulqarnain. 2022. The Effectiveness of the Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*. Vol 5, July 2022. <http://ijssrr.com editor@ijssrr.com>
- Ema, Fitri Lubis dan Evi Zubaidah. 2021. Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-Riyasah*, Vol 12 No 2 (2021). <https://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Eva Nurlina dan Evi Zubaidah. 2017. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Revitalisasi Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 3, No. 2 Hal 319-330 (2017). <http://journal.uir.ac.id>
- Fitri Lubis, Ema dan Evi Zubaidah. 2019. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. Vol. 5, No. 2 : *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>
- Fitri Lubis, Ema dan Evi Zubaidah. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Vol. 9 No. 2 (2020). *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. Doi: <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>
- Felinda Wulandari, Yamardi, Titin Rohayatin. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Caraka Prabhu*. Vol. 4 No. 1 (2020) : Edisi juni 2020, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>
- Greaccela Alda Rahma Dany, Siti Maizul Habibah. 2021. Efektivitas BLT Bagi Warga Non-PKH Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Susun Sudimoro. *jurnal kajian moral dan kewarganegaraan*. Vol. 09 No. 02 Tahun 2021, 435-452 <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Indrawan. (2019). Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Simplex*. Vol. 2 No. 3 (2019) : Edisi Desember 2019, <https://fe.ummetro.ac.id>
- Janah, A. N. 2019, Optimalisasi Layanan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lansia Di Kecamatan Kebasen Kabupaten Bengkalis.

- John M. Bryson, Lauren Hamilton Edwards & David M. Van Skyke. 2018. Getting Strategic About Strategic Planning Research, *Public Management Review*, 20(3): 317-339. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2017.1285111>
- khadafi Rizal, Mutiarin Dyah. 2017. “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”. *Journal of governance and public policy* Vol. 4 No. 2, Juni 2017. <https://ejournal.doi.org/article/governance.and.publik>
- Lies Kumara Dewi, Eka Ubaya Taruna Rauf, Husna Purnama, Adi Pramana. 2022. Implementation of The Family Hope Program in Poverty Reduction in Cilimus Village Teluk Pandan District Pesawaran Regency. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)* Vol. 1 Issue 2, April 2022 E-ISSN 2809-5960. <http://journal.sinergicendikia.com/index.php/ijeset>
- Lini dan Wahyu Subadi. 2021. Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB* : Vol. 4 No. 1, (2021) ISSN : 2723-0937 <Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- Mega Pertiwi dan Evi Zubaidah. 2018. Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 1 Hal. 319-331 (2018) <https://journal.uir.ac.id>
- Nuraida. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang*. Vol. 1 Issue 2, Desember (2019). <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Nova Abizal, Maimun, Yulindawati. 2022. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jibes : Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, (2022) <https://journal.ar-raniry.ac.id>
- Nurul Infitah, Sukidin, Wiwin Hartanto. 2018. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 12 No 1 (2018) DOI : <https://10.19184/jpe.v13i2.11346>
- Rendi Afringgo, Nurmasari dan Evi Zubaidah. 2021. Efektivitas E-Warong Sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan Pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal*

Ranah Publik Indonesia Kontemporer. Vol. 1 Tahun (2021).
<https://rapik.pubmedia.id>

Ratna Frenty Nurkhalim, Sukamdi dan Djauhar Ismail. 2020. Mixed Method Study On Evaluation Of The Impact Of The Family Hope Program On Birth Weight In Nganjuk, East Java. *International Conference on Public Health Solo, Indonesia*, Vol. 18. No.19 November (2020).
<https://doi.org/10.26911/the7thicph-FP.02.08>

Rismana, Daud. 2019. Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, 138.

Rita Yuniarti, Najiya Arroisi, Sugih Bhakti Arifta, Mohd Haizam Saudi 2022. The Effect of Government Internal Control System on Fraud Prevention (Case Study on Family Hope Program Operator Tasikmalaya). *Central Asia And The Caucasus*. Vol. 23, 2022. DOI : <https://doi.org/10.37178/ca-c.23.1.289>

Sabinus Beni, Blasius Manggu. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia*. Vol. 9, No. 02, (2020) : Edisi 14 April 2020,
<https://researchgate.net>

Sri Sutjiatmi, Farida Umaroh. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhuri Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan)* Vol. 2 No. (2), (2019) : Edisi Oktober 2019. <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/igj>

Soni Akhmad Nulhaqim Nandang Alamsah Deliarnoor, Taqiya Arini Putri. 2022. Hope Family Program Social Assistance : (Implementation In Indonesia And Digital Platform Adaptation As A Strengthening Step). *Central Asia And The Caucasus*. Vol. 23 Issue 1 (2022). DOI : <https://doi.org/10.37178/ca-c.23.1.300>

Suzi Ariffanti, Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

Suwinta dan Prahawati. 2016. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan kedemangan Kabupaten Blitar. *Kajian kebijakan Politik* Volume 1 Nomor 1, 1-5.

Tarmizi, A. 2021. A qualitative study of transformation leadership and organization success. *Journal Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6712818>

Utami Ningsih Darwis. 2022. Implementation of Family Hope Program (PKH) in Palopo. *Journal of Management*. Vol. 12 No. 2. (2022) e-ISSN 2721-7787. www.enrichment.iocspublisher.org

Zaman Zaini, Muhammad Nata Nugraha. 2020. The Effect Of Implementation Of The Hope Family Program On The Fulfilment Of Basic Food Needs Of Beneficiaries Family During The Covid-19 Pandemic On Jatisampurna District, Bekasi city. *Journal of Indonesia law & Policy Review* Vol. 3, No. 2. February 2022. <https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/64/57>

Zulfian, 2014. *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusi Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, hal 36-38.

Sumber Lain :

Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. Tahun 2016.

Buku Pedoman Umum Program keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013.

Kementerian Sosial Indonesia Tahun 2013 Tentang Penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH. Jakarta : UPPKH Pusat.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2016 Tentang Indeks Komponen Bantuan Program Keluarga Harapan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.